

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL IMBAYUD TAKA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SAFRINI SARI

NIM: 500582031

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

THE POLICY IMPLEMENTATION INTRADITIONAL MARKET
MANAGEMENT IN THE IMBAYUD TAKA TANA TIDUNG REGENCY

Safrini Sari
Safrini.Sari64@gmail.com

Postgraduate Program
Open University

This study aims to examine the management of Imbayud Taka traditional market at the Tana Tidung Regency and the policy Implementation in the Traditional Market Management of Imbayud Taka at the Tana Tidung Regency.

In terms of methodology, this research used a qualitative research method with a descriptive approach.

The results show that the market does not meet the standards issued by the Regency Office, lack of budgetary resources and human resources, lack of communication among parties involved in market management.

It can be concluded that the Imbayud Taka traditional market at the Tana Tidung Regency does not adopt good management system. The policy implementation of Market Management in the Imbayud Taka market can be explained by four factors, namely :policy standards and goals, resources, and characteristics of implementing agencies and strengthening activities and communication between organizations that are not yet fully effective, generally speaking.

Therefore, it is necessary to have a clear coordination between the Department of Labor, Perindagkop and Transmigration with all the parties involved, such as holding a coordination meeting among relevant SKPDS. Moreover, socialization activities to the community in the form of counseling or coaching to marketer, purchaser and market manager about the importance of market management for the community are also needed.

Keywords : Implementation, Policy, Market Management.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
IMBAYUD TAKA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Safrini Sari
Safrini.Sari64@gmail.com

Program PascaSarjana
Universitas Terbuka

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pengelolaan Pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung dan mengkaji bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung.

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasar belum memenuhi standar kabupaten, kurangnya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi yang terjalin dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar.

Kesimpulan dari penelitian pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung belum mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Implementasi Kebijakan Pengelolaan pasar Tradisional Imbayud Taka dapat dijelaskan melalui empat faktor yaitu, Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana dan Penguatan Aktivas dan Komunikasi antar organisasi yang umumnya belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan juga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pasar

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : Safrini Sari/500582031
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka
Di Kabupaten Tana Tidung

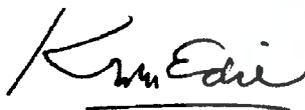
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/~~belum~~ selesai sekitar 85% sehingga dinyatakan sudah layak uji/~~belum layak uji~~ dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Tarakan, Juni 2016

Mengetahui :

Pembimbing II

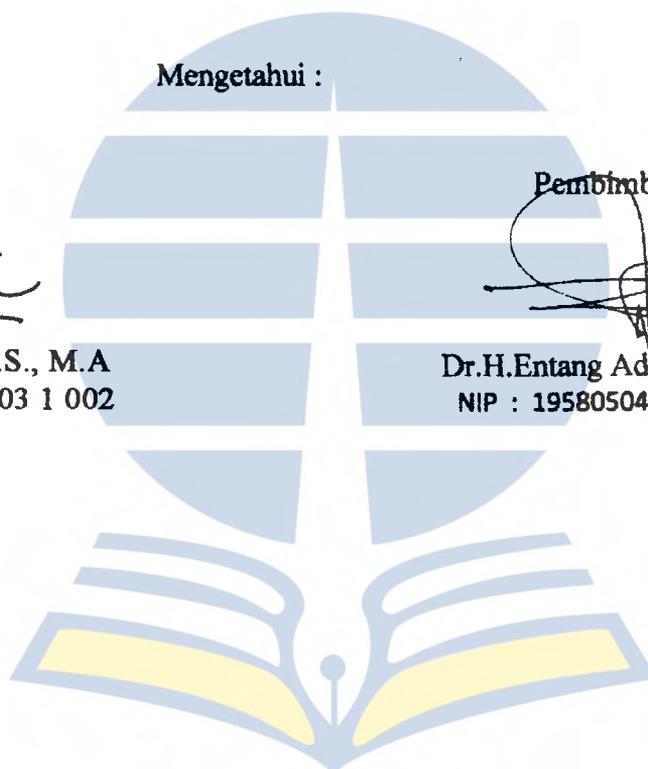


Prof. Dr. Karnadi, S.S., M.A
NIP. 19640508 199903 1 002

Pembimbing I



Dr.H.Entang Adhy Muhtar .MS
NIP : 19580504 1986 01 1001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Safrini Sari
 NIM : 500582031
 Program Studi : Pascasarjana Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Jumat/09 Desember 2016
 Waktu : 14.00-15.00Wita

Dan Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr.Sofjan Aripin,M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr.Budiman Rusli, M.S

Pembimbing I

Nama : Dr.H.Emeng Ady Muhtar.MC

Pembimbing II

Nama : Prof.Dr.

Kum Edie

PERSETUJUAN TAPAK

Judul TAPAK : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung.
 Penyusunan TAPAK : Safrini Sari
 NIM : 500582031
 Program Studi : Pasca Sarjana
 Hari/Tanggal : Jumat/09 Desember 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,



Prof. Dr. Karnedi, S.S., M.A.
 NIP. 19640508 1999 03 1 002

Pembimbing I,



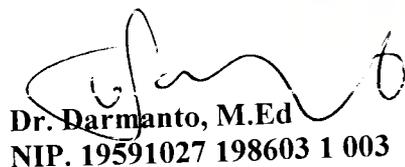
Dr. H. Entang Ady Muhtar, MS
 NIP. 19580504 1986 01 1 001

Penguji Ahli

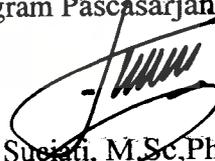


Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S.
 NIP. 19600509 1986 03 1 006

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik,
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana


Susiati, M.Sc., Ph.D.
 NIP. 19520213 1985 03 2 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah, limpahan rahmat dan Ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan TAPM ini. Penyusunan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Administrasi Publik (MAP) program Pascasarjana Universitas terbuka.

Penelitian dan penulisan TAPM ini mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Disampaikan banyak terima kasih kepada Dr.H.Entang Adhy Muhtar.MS, sebagai Pembimbing 1 dan Prof.Dr. Karnedi,S.S.j M.A, selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan sejak dimulainya sampai dengan selesainya penyusunan TAPM ini. Hal yang sama disampaikan juga kepada:

1. Bapak Bupati Tana Tidung atas pemberian ijin belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca sarjana Universitas Terbuka
4. Bapak Kepala UPBJJ-UT Samarinda beserta staf yang selama ini banyak berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan

5. Bapak Kepala UPBJJ-UT Tarakan beserta staf yang selama ini banyak berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan
6. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Prindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dan Kepala Seksi Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM atas dukungan moril dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan yang telah bersama-sama penulis menempuh suka dan duka selama mengikuti pendidikan
8. Orang Tua tercinta H.Ramlie Arsyad dan Hj.Salmiah yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Kepada Suami tercinta Marzuki, dan anak-anakku, Maika Izano Filzan, Nurhaniah Bilqis yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian dan kesabaran selama penulis mengikuti pendidikan.
10. Ibu SY. Camelia Faridah, S.P. selaku pengelola S2 Kelas Tarakan, Bapak Totok Murhanto, S.Kom, yang telah memfasilitasi tempat perkuliahan kelas M.AP selama 4 semester dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian sampai pada penulisan TAPM ini.

Disadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan. Akhir kata diharapkan semoga TAPM ini dapat bermamfaat.. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya.

Tana Tidung, 28 Desember 2016

Penulis



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Safrini Sari,ST
 NIM : 500582031
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat / Tanggal Lahir : Tarakan, 12 Januari 1980

Riwayat Pendidikan:

- ✓ Lulus dari SDN 007 Tarakan pada tahun 1991
- ✓ Lulus dari SMPN 2 Tarakan pada tahun 1994
- ✓ Lulus dari SMA Negeri 1 Tarakan, Kota Tarakan pada tahun 1997
- ✓ Lulus S1 dari Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan :

- ✓ Tahun 2003 s/d tahun 2006 Tenaga Honor PDAM Tarakan
- ✓ Tahun 2006 s/d 2008 Tenaga Honor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2008 s/d tahun 2010 Tenaga Honor Pada Bidang Pariwisata Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2011 s/d 2016 Staf Perindustrian pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2016 s/d sekarang Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jamsosnaker pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tana Tidung, 12 Desember 2016

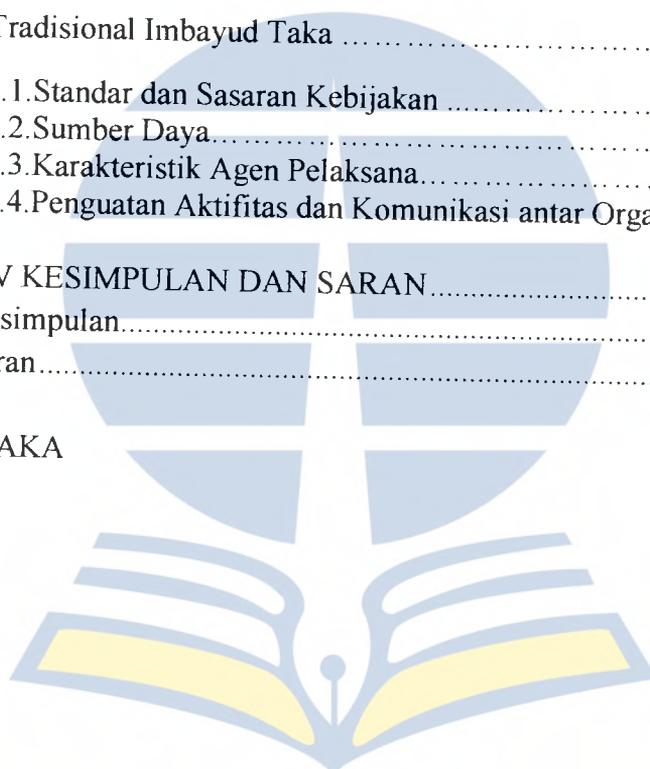
Safrini Sari, ST
 NIM. 500582031

DAFTAR ISI

Abstract.....	i
Abstrak.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata pengantar.....	vi
Riwayat hidup.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teoretis.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	14
3. Model Kebijakan Publik.....	15
4. Pasar Tradisional dan Modern.....	19
5. Permasalahan Utama Pasar.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berfikir.....	30
D. Operasionalisasi Konsep.....	31
III. BAB METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informen.....	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Prosedur Penelitian.....	38
F. Metode Analisis Data.....	40

IV.	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
	1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung.....	42
	a. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	42
	b. Keadaan Penduduk dan Potensi Yang dimiliki	43
	c. Keadaan Penduduk Kabupaten Tana Tidung.....	45
	d. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung..	46
	2. Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung.....	48
	3. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop Transmigrasi	49
	B. Hasil Dan Pembahasan	66
	1. Pengelolaan Pasar Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung... 66	
	2. Pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka	71
	2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan	72
	2.2. Sumber Daya.....	81
	2.3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	89
	2.4. Penguatan Aktifitas dan Komunikasi antar Organisasi.....	96
V.	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Model rasional sederhana oleh Patton Savicky	15
Bagan 2.2. Kerangka Pemikiran	30
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja,Perindagkop	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Kelamin	43
Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	47
Tabel 4.3. Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja perindagkop dan Tranmigrasi	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran suatu wilayah, selalu diikuti oleh segala bentuk permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Bagi daerah baru, permasalahan yang sering terjadi adalah yang berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan segala bentuk tuntutan akan penyediaan fasilitas daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penghuninya.

Frey (1999), seperti yang dikutip oleh Edy (2005:3), mengkaitkan kebutuhan kota dengan kebutuhan dasar manusia dari hirarkhi Moslow yaitu pada tingkatan dasar (*basic level*), fasilitas kota yang disediakan adalah semua kebutuhan fisik masyarakat antara lain ; tempat tinggal dan tempat kerja, pendapatan yang memadai, pendidikan dan kursus, transportasi dan memungkinkan untuk mengadakan komunikasi dengan fasilitas kota dan pelayanan-pelayanan kota, pada tingkatan kedua, hal-hal yang harus diperhatikan oleh kota adalah keselamatan(*safety*), keamanan (*security*) dan perlindungan (*protection*), unsur visual, fungsi, susunan dan control terhadap lingkungan yang harus bebas polusi, kebisingan, kecelakaan, dan kriminologi. Tetapi saat ini pemenuhan semua tuntutan dari masyarakat masih jauh dari harapan. Hal ini tidak lepas dari kompleksitas berbagai masalah di wilayah baru tersebut mulai dari persoalan penyediaan sarana perumahan , ruang publik yang langka dan mahal, dana yang tidak mencukupi, sistem transportasi, fasilitas perkonomian, lapangan

pekerjaan, serta tingkat kualitas sumber daya manusia yang masih lemah Subroto, TYW (2005:1).

Akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan pemekaran, kebutuhan akan fasilitas ekonomi pun akan semakin meningkat, sehingga tumbuhlah berbagai fasilitas ekonomi moderen seperti , Ruko, Supermaket, dan Mini market. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Tetapi dalam perkembangannya keberadaan pasar modern pada kota-kota kecil dikuatirkan akan membuat pasar tradisional menjadi kurang diminati dan semakin terpinggirkan. Tidak berbeda dengan wilayah baru yang lain, kabupaten Tana Tidung juga berusaha menata salah satu fasilitas ekonomi yang dianggap penting di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah sejak peresmian Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2007 sudah mencoba menata pasar tradisional yang ada di wilayah tersebut. Pada awalnya pasar di Tana Tidung terletak di sepanjang jalan utama kabupaten, di depan rumah penduduk. Kini sejak tahun 2007 pemerintah daerah sudah menyediakan satu pasar tradisional di wilayah kecamatan Sesayap.

Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Dimana disana tempat terjadinya transaksi bertemunya penjual dalam memasarkan dagangannya dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam pasar, interaksi yang sering terjadi adalah adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Hal ini sudah menjadi sosial budaya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dilakukan. Pasar seperti ini disebut dengan pasar

tradisional. Tetapi pada umumnya pasar tradisional di seluruh Indonesia fasilitas kenyamanan yang menjadi masalah utama. Pasar tradisional terkesan kotor, kumuh, bau dan lain sebagainya sehingga membuat para pembeli kurang nyaman akibat dari pengelolaan yang kurang baik.

Pasar tradisional menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden No. 112 Tahun 2007, seperti yang dikutip oleh Firmanzah dan R.E Halim (2012:6) adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama antara pemerintah dan swasta, berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha dengan usaha mikro, kecil, menengah dan dalam proses jual beli barang dan jasa melalui proses tawar-menawar.

Pasar tradisional umumnya menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Sedangkan pada pasar modern adalah penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung serta tidak ada tawar-menawar, melainkan pembeli melihat label harga yg tercantum dlm barang, berada dlm bangunan yang sangat terstruktur dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yg dijual, selain bahan makanan-makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yg dijual adalah barang yg dpt bertahan lama. Sebagian pasar tradisional di Indonesia sudah tidak ramai karena diakibatkan banyaknya pasar modern seperti Mall dan Supermarket yang berkembang pesat di Kota-kota besar seluruh Indonesia.

Kehadiran pasar modern menggeser kegiatan ekonomi rakyat yang bergerak di pasar tradisional. Pasar modern memberikan banyak kenyamanan yang membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Pasar modern menjual banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses oleh publik, lingkungan pasar modern lebih nyaman dan bersih, bahan pangan atau produk diawasi ketat oleh badan pengawas makanan dan tidak akan dijual apabila telah kadaluarsa.

Saat ini banyak pasar tradisional yang mulai kehilangan pamornya dan ada pula yang gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh kurang tanggapnya pemerintah daerah terhadap keberadaan pasar tradisional. Banyak pasar tradisional yang kurang dan ada pula yang tidak sama sekali di urus atau ditanggapi oleh pemerintah kota. Selain itu mulai banyaknya pertumbuhan hypermarket dan pusat perbelanjaan modern. Hypermarket ini tumbuh di lokasi yang mendekati pasar – pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional yang sangat memprihatinkan seperti becek, bau, banyak sampah yang dibuang sembarangan juga menjadi kelemahan bagi pasar tradisional. Sebagian masyarakat kita memilih untuk berbelanja di hypermarket yang cenderung lebih baik dari segi pelayanan dan fasilitas.

Pasar sebagai sarana yang baik untuk ekonomi masyarakat. Jika pasar dikelola dengan baik maka pasar menjadi, aman, segar, sehat dan higienis, ramah lingkungan, nyaman, dan bersih sehingga penghasilan dan kesejahteraan pasar meningkat. Pengelolaan pasar tradisional sangat dibutuhkan. Mengingat begitu

pentingnya peran pasar tradisional, maka perlu adanya peran pemerintah baik pusat atau daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan pasar tradisional.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan pengelolaan pasar tradisional. Kebijakan-kebijakan pengelolaan Pasar tradisional yang dilakukan didukung dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dikemukakan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki dua Pasar Tradisional yaitu, Pasar Imbayud Taka yang terletak di Ibu Kota Kabupaten dan Pasar Tradisional Betayau yang terletak di Desa Kujau Kecamatan Betayau.

Di Kabupaten Tana Tidung lokasi pasar yang strategis terletak ditengah Kabupaten. Kebanyakan pasar tradisional terkesan kumuh dan kotor begitu juga dengan pasar Imbayud Taka, namun ada yang berbeda dipasar tradisional ini terdapat keunikan-keunikan didalamnya ada nilai-nilai sosial budaya, selain ekonomi, ada sistem tawar menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki pasar

tradisional Imbayud taka ini. Sisi kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu pemandangan yang indah kala berada dipasar.

Pasar Imbayud Taka berdiri pada tahun 2007 dengan luas lahan 300 m² dan luas bangunan 148 m² dengan jumlah kios 32 dan los 54, Adapun spesifikasi dagang yang diperjual belikan yaitu, kebutuhan pokok, hasil bumi, sayur-sayuran, buah-buahan, Ikan, konveksi. Pada awalnya untuk 32 kios diisi oleh pedagang sayur-sayuran dan ikan, sedangkan 54 los diisi untuk kebutuhan pokok sembako.

Pada saat ini ditahun 2016 kenyataannya sudah tidak sesuai banyaknya permasalahan yang terjadi dipasar terutama mengenai pengelolaan pasar . Adapun masalah tersebut diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi antara Pemerintah dan Pengelola Pasar sehingga terjadi perubahan penomoran petak kios yang awalnya diatur oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi, serta berpindahtangannya kepemilikan awal kios dan los tanpa mengkoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi.
2. Kemampuan Pengelola Pasar yang rendah dalam mengelola ketertiban pedagang dan melakukan pemberdayaan terhadap pedagang sehingga berubahnya peruntukkan 32 kios yang awalnya pedagang sayur menjadi bertambah sayur dan sembako.
3. Sistem pengelolaan keuangan dengan swakelola dan masih sangat tradisional dan sederhana.
4. Pengelolaan sampah dan limbah pasar lainnya yang kurang baik sehingga sering mengakibatkan pasar menjadi kotor dan bau.

5. Belum berjalannya pengelolaan retribusi pasar sehingga banyak pungutan liar terhadap pedagang baik untuk keamanan dan kebersihan pasar.
6. Kurangnya monitoring dan tindakan dari dinas terkait mengenai adanya isu jual beli petak kios dan los pasar serta beberapa kios dan los yang kosong dan tutup.
7. Dalam Pembagian tugas dalam hal pengelolaan sering terjadi lempar tugas antar Instansi yang satu dengan Instansi yang lainnya.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa dapat dikatakan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional tersebut belum maksimal. seperti yang di ungkapkan oleh van horn dan van meter bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 6 variable yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan. (2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource). (3). Hubungan antar Organisasi. (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. (6) Disposisi implementor. Ke enam variabel ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar di kabupaten Tana Tidung belum memnuhi variabel yang di ungkapkan oleh van horn dan van meter sehingga kebijakan yang ada belum bisa dijalankan secara maksimal, dan kurangnya kerjasama yang dilakukan baik dari pihak Pengelola Pasar dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL IMBAYUD TAKA DI KABUPATEN TANA TIDUNG”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, penelitian ini bertujuan :

1. Mengkaji tentang pengelolaan pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung
2. Mengkaji tentang implementasi kebijakan pengelolaan Pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan publik dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan pasar. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Tana Tidung.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengembangan konsep Implementasi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian implementasi kebijakan pengelolaan pasar selanjutnya karena proses implementasi kebijakan tersebut selalu berkembang, sehingga ilmu pemerintahan dapat mengikuti perkembangan kebijakan tersebut bisa berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Kebijakan Publik

Menurut Carl J Frederick, seperti dikutip oleh Agustino (2008:7), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Istilah kebijakan (*policy*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi (Winarno, 2002:15). Namun para ahli sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2009:11). Suandi (2010:12) mengemukakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan

kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan - aturan yang ada didalamnya.

Rose (1969:79), juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukansesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Anderson (1979:2), menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya

dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep *filosofis*, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Keban, 2004:55).

Dunn (2009:39), menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase *penyusunan agenda*, dimana para pejabat baik itu yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat, mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.
2. Fase *formulasi kebijakan*, dimana didalamnya pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.
3. *Adopsi kebijakan*; disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan consensus kelembagaan.
4. *Implementasi kebijakan*, yang didalamnya kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.

5. *Penilaian kebijakan*, di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Pressman dan Widavsky (1999:55) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan otoritas negara yang dibuat oleh administrator publik yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat publik. Kebijakan publik tidak mengatur masalah yang sifatnya

individual, tetapi masalah bersama. Masalah bersama berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

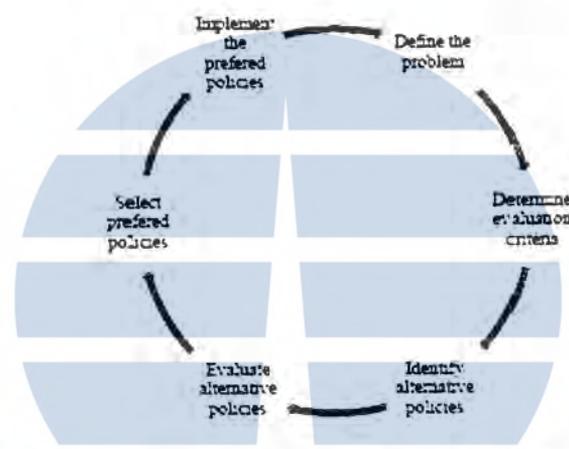
Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur Negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Politik, menurut Frank Goodnow (1900), berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh Negara. Ini berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan administrasi, berhubungan dengan implementasi apa yang harus dilakukan oleh negara dan apa yang efisien untuk dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Kompleksitas

implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing masing variabel pengaruh tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

3. Model Kebijakan Publik

Semua model formulasi kebijakan difokuskan pada sistem politik untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik itu harus diformulasikan. Menurut Patton Savicky menjelaskan lebih eksplisit terkait model kebijakan publik. Model Patton Savicky dapat digambarkan sebagai berikut (Nugroho, 2006:61):



Gambar 2.1 Model rasional sederhana oleh Patton Savicky

Model tersebut adalah model klasik yang dipakai oleh pengambil kebijakan. Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan untuk menuju pada pilihan-pilihan pemecahan masalah yang disebut pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan. Selanjutnya menilai seluruh alternatif tersebut, termasuk memberikan bobot dan penilaian masing-masing alternatif untuk menghasilkan alternatif

terbaik kemudian dipilih sebagai keputusan atau kebijakan. Selanjutnya mengimplementasi kebijakan sesuai dengan prosedur-prosedur teknik itu.

Model Implementasi kebijakan sebagai hal yang penting dalam menghasilkan output kebijakan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a) Model Van Horn dan Van Meter (1975)

Model ini memprioritaskan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.. Variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut adalah:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2) Sumber daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi

Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi

4) Karakteristik agen pelaksana

Pembagian wewenang serta hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam implementasi pelaksanaan kebijakan

b) Model Gunn dan Hoodwood (1980 :7)

Kedua pakar ini menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal tidak memunculkan masalah yang besar.
- 2) Pelaksanaan sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- 4) Implementasi kebijakan didasari dengan hubungan kausal yang handal

Menurut Pendapat Gunn dan Hoodwood di hubungkan dengan pendapat Varn Horn Van meter terdapat beberapa kesamaan dimensi, kedua-duanya ternyata menyatakan kesamaan dari segi sumber daya. Ada juga perbedaan pendapat Gunn dengan Varn Horn Varn Meter, pendapat Gunn lebih melihat kondisi eksternal dan hubungan kausal yang handal.

c) Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut S. Grindle (1980) model implementasi kebijakan publik adalah sebagai keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan hingga tercapainya hasil, tergantung aktivitas program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain itu dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*contex of Implementation*). Isi dari kebijakan yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

- 1) *Interest affected* (kebijakan yang memenuhi kepentingan).
- 2) *Type of benefit* (jenis manfaat yang dihasilkan).
- 3) *Extent of change envisioned* (Derajat perubahan yang ingin dicapai).
- 4) *Site of decision making* (Kedudukan pembuat kebijakan).
- 5) *Program implementators* (Para pelaksana program).
- 6) *Resources commited* (Sumber daya yang dikerahkan).

Pendapat Merilee S. Grindle (1980) yang dihubungkan Varn Horn Varn Meter (1975) dan Gun and Hoodwood (1980) juga terdapat kesamaan dimensi yaitu dari sumber daya, menurut pendapat Merilee S. Grindle terdapat dimensi Kedudukan pembuat kebijakan dan para pelaksana program, sedangkan kedua dimensi ini menurut pendapat Varn Horn Varn Meter telah termasuk didalam dimensi karakteristik agen pelaksana.

Sedangkan pada konteks implementasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Power* (kekuasaan).

- 2) *Interest strategies of actors involved* (kepentingan strategi aktor yang terlibat).
- 3) *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan penguasa).
- 4) *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap pelaksana).

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Van horn Van Meter, karena kebijakan yang diteliti merupakan kebijakan Peraturan menteri dalam negeri, model implementasi yang dikemukakan tersebut dianggap relevan karena bersifat linier dan cocok di implementasikan pada level birokrasi yang terstruktur dimana setiap level hierarki mempunyai peran yang sesuai dengan fungsi dalam menjabarkan kebijakan.

4. Pasar Tradisional dan Modern

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios atau los dan tenda, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang umumnya dimiliki oleh pemodal kuat, mempunyai kemampuan untuk menggaet konsumen dengan cara memberikan hadiah langsung, hadiah khusus, dan juga discount-discount menarik (Zumrotin, 2002: 98).

Pasar modern pada umumnya diisi oleh retailer (pengecer besar), baik perusahaan pengecer dengan skala lokal maupun nasional. Mereka ini merupakan pesaing yang mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional. Oleh karena itulah

modernisasi pasar dengan manajemen pengelolaan secara modern baik dari sistem pengelolaan maupun kelembagaannya perlu ditingkatkan untuk mengembangkan perekonomian pedagang kecil serta pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Yamato (2011) dalam blognya, kelebihan dan kelemahan pasar tradisional dan pasar modern adalah sebagai berikut:

1. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Biasanya lokasi dari pasar tradisional ini strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, memiliki harga yang rendah, serta sistem tawar-menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki pasar tradisional. Sisi kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu pemandangan yang indah kala berada di pasar
2. Pasar tradisional memiliki kelemahan yang sangat urgen ialah pada kumuh dan kotornya lokasi pasar. Bukan hanya itu saja, banyaknya produk yang mayoritas diperjualbelikan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan kimia yang tak seharusnya dipakai, dan praktek seperti itu marak sekali terjadi di pasar tradisional. Bukan hanya itu saja, kurang menariknya kemasan produk di pasar tradisional juga yang membuat kurang dilirik konsumen, bahkan makin hari bukannya semakin bagus akan tetapi malah semakin memburuk kondisinya. Dan jelas hal seperti itu cukup membahayakan keberadaan pasar tradisional.
3. Kelebihan pasar modern dibanding pasar tradisional cukup jelas, mereka memiliki banyak keunggulan yakni; nyaman, bersih serta terjamin. Dan tiga hal tersebut yang membuat para konsumen mau membeli ke pasar modern. Sejuk,

bersih, nyaman mempunyai peranan penting bagi pasar modern, dan ketiga komponen tadi menjadi andalan dari pasar modern dan hal tersebut tidak dimiliki oleh pasar tradisional.

4. Secara sekilas, tidak terdapat kelemahan dari pasar modern ini. Mungkin kelemahannya terdapat pada praktik jual belinya dimana konsumen tidak bisa menawar harga barang yang hendak dibelinya.

Sulistyowati (1999:1) merumuskan karakteristik umum kegiatan pasar tradisional sebagai berikut:

1. Pengelolaan:

- a. Pasar tradisional dikelola oleh pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Pasar).
- b. Pasar tradisional terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan/ rumah tangga yang pengelolaannya masih tradisional (umumnya berdasarkan bakat dan naluri)

2. Organisasi:

Ada koperasi pedagang pasar, tetapi organisasi dalam pengelolaan kegiatan berdagangnya sendiri tidak ada.

3. Kondisi fisik tempat usaha:

- a. Bangunan temporer, semi permanen atau permanen, terdiri atas toko, kios, jongko, los dan pelataran.
- b. Kebersihan tidak terjaga dengan baik (becek, kotor, bau, dll) sehingga mengurangi kenyamanan berbelanja.
- c. Gang antar kios/los terlalu sempit sehingga mengurangi keleluasaan bergerak

d. Fasilitas parkir tidak memadai

4. Barang:

- a. Barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari (barang primer dan sekunder), bahan pangan pokok yang tidak tahan lama cukup menonjol.
- b. Barang yang dijual umumnya lebih segar dan bervariasi.
- c. Harga barang relatif murah, tidak bersifat mati dan dapat ditawar.
- d. Penataan barang seadanya.

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya terdapat proses tawar-menawar. Bangunan pasar terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan sandakan terbuka yang disediakan oleh penjual maupun pengelola pasar. Pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan ikan, buah, sayuran, kain, daging, telur, pakaian, barang elektronik dan lain-lain (Malano, 2011:62).

Sumber dana pasar tradisional meliputi kategori akses sumber pendanaan bagi pedagang sebagai modal kerja dan pendanaan bagi pengelola pasar yang dapat digunakan untuk pengelolaan pasar atau mengaktifkan kegiatan pasar tradisional. Pendanaan tersebut juga dapat digunakan dalam pengelolaan sistem pasar tradisional (Kemendag, 2015:73).

Pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman sarana dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe. 4 tipe dapat dijabarkan sebagai berikut (Kemendag, 2015:45-55):

1. Tipe A

- a) Luas lahan paling sedikit 3000 meter persegi
- b) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah
- c) Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- d) Jumlah pedagang paling sedikit 150 pedagang
- e) Bangunan utama kios, los, dan sarana pendukung lainnya
- f) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum
- g) Di kelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
- h) Kegiatan operasional dilakukan paling sedikit tiga hari dalam seminggu
- i) CCTV terhubung secara online dengan kementerian perdagangan.

2. Tipe B

- a) Luas lahan sedikitnya 1500 meter persegi
- b) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah
- c) Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- d) Jumlah pedagang paling sedikit 75 pedagang
- e) Bangunan utama kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya
- f) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- g) Pasar dikelola langsung oleh manajemen pengelola pasar

- h) Kegiatan operasional dilakukan paling sedikit tiga hari dalam seminggu
- i) CCTV terhubung secara online dengan kementerian perdagangan melalui internet untuk memantau aktivitas perdagangan

3. Tipe C

- a) Luas lahan paling sedikit 1000 meter persegi
- b) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah
- c) Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- d) Jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang
- e) Bangunan utama kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya.
- f) Telekomunikasi
- g) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- h) Pasar dikelola secara langsung oleh pengelolaan pasar
- i) Kegiatan atau operasional dilakukan paling sedikit tiga hari dalam seminggu

4. Tipe D

- a) Luas lahan paling sedikit 50 meter persegi
- b) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah
- c) Jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang
- d) Bangunan utama kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya

- e) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- f) Dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar
- g) Kegiatan atau operasional dilakukan paling sedikit satu atau dua hari dalam seminggu

Semua tipe pasar tradisional menggunakan kios dan los sebab menjadi fungsi utama dalam melakukan perdagangan. Perbedaan dari keempat tipe terletak pada luas lahan, jumlah pedagang, perlengkapan CCTV dan lain-lain. Tipe keempat pasar tradisional tidak menggunakan CCTV dalam mengawasi perdagangan oleh Kementerian perdagangan.

5. Permasalahan Utama Pasar

Pasar sebagai suatu infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah tentunya memiliki berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pengelola. Beberapa permasalahan utama pasar yang berasal dari Zumrotin(2002:17):

1. Pengelolaan : Ketidakmampuan dalam mengelola pasar tradisional untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, nyaman, serta tidak adanya upaya untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang untuk berpraktek dagang yang sehat dan jujur akan menyebabkan konsumen enggan berbelanja dipasar tradisional. Selain itu pasar yang becek, berbau tidak sedap, tidak aman/ rawan keamanan, dan praktek dagang yang tidak sehat akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan konsumen sehingga mereka lebih baik meninggalkan pasar tradisional karena memiliki resiko tinggi

2. Tata Ruang dan Lokasi :Masalah timbul dari operasional tata ruang, lokasi dan masih tersdianya tempat usaha yang tidak produktif.

3. Pola Pembangunan dan Pendanaan :Selama ini pemerintah melakukan sistem pengadaan atau penyediaan pasar khususnya pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur, yaitu dengan melakukan pembangunan fisik pasar yang belum ada wujudnya, dimulai dengan penyediaan lahan sampai berdirinya bangunan pasar yang dioperasikan (Thamrin, 2013: 134). Keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola pasar tradisional (Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) saat ini adalah adanya kebijakan regulasi di bidang dunia usaha nasional yang mulai menitikberatkan pada usaha perekonomian rakyat. Situasi pasar yang lebih bebas dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas dan kuantitas menghasilkan produk yang lebih tinggi. Kurang dan terbatasnya modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasional dan pemeliharaan perusahaan, dan rendahnya hasil usaha, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan pengembangan investasi, kurangnya profesionalisme, transparansi, dan pengawasan dalam manajemen pengelolaan perusahaan serta banyaknya BUMD yang mengalami kesulitan keuangan (Subowo, 2002:17).

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan dan memfokuskan untuk membahas dan menganalisis permasalahan tentang pengelolaan Pasar Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini peneliti mengutip empat hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Paskarina, Mariana, Atmoko (2005) di Kota Bandung, Musthakim (2004) di Kabupaten Jepara, Satoto Martono(2006) di Kota Surakarta. Ratna Pratiwi (2012) di Kota pangkal pinang

Penelitian mengenai pengelolaan pasar tradisional di Kota Bandung pernah dilakukan oleh Paskarina, Mariana, Atmoko (2005) di Kota Bandung. Tesis tersebut menganalisis Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Kajian ini menggunakan metode analisis kebijakan (policy analisis method) yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan yang bisa memecahkan masalah public yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan paradigma pengelolaan pasar, dimana revitalisasi pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan property kota yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan capital bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, revitalisasi pasar menjadi sebuah instrument untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat. Menegakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten misanya yang menyangkut tata ruang, alihguna lain lahan, perizinan bagi pasar modern, ketentuan batas minimal jarak pasar modern dari pasar tradisional. Merumuskan model kemitraan lintas stakeholders untuk memberdayakan pedagang dipasar tradisional serta memperkuat posisi tawar pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern.

Penelitian mengenai Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Musthakim (2004) di Kabupaten Jepara. Penelitian tersebut bertujuan untuk Mengetahui perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Metodologis Analisis melakukan wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Hasil Analisis SWOT dari penelitian ini memperlihatkan lemahnya pengawasan organisasi yang dilakukan dilingkungan Pasar Welahaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara. Tidak berwenangnya Kepala pasar menilai DP3 setiap akhir tahu pada staf pasar welahan merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan organisasi sehingga sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan retribusi pasar, karena pengawasan yang bersifat pencegahan sulit. Lemahnya penegakan hukum sangat menyulitkan petugas pemungut, karena pasar diharuskan untuk dapat menutup target yang telah ditetapkan namun bila ada pedagang yang tidak membayar, petugas tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pedagang. Agar pengawasan lebih efektif dan penegakan hukum dapat dijalankan maka perlu perbaikan terhadap prosedur kerja atau dilakukan penyempurnaan sehingga memungkinkan pengawasan dan perlu diberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengelola pasar.

Penelitian mengenai Analisis Potensi Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta pernah dilakukan oleh Martono (2006). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi dan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta selama periode 2001-2005 terhadap pemungutan retribusi pasar.

Metodologis analisis melakukan wawancara dengan dinas perindustrian dan koperasi kota Surakarta. Analisis data menggunakan model analisis SWOT. Sehingga muncul isu-isu strategis yaitu rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hasil analisis Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dapat dicapai tidak harus melalui penambahan beban bagi masyarakat perhitungan potensi, efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah antara lain dapat dilakukan melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi bagi para penghindar retribusi.

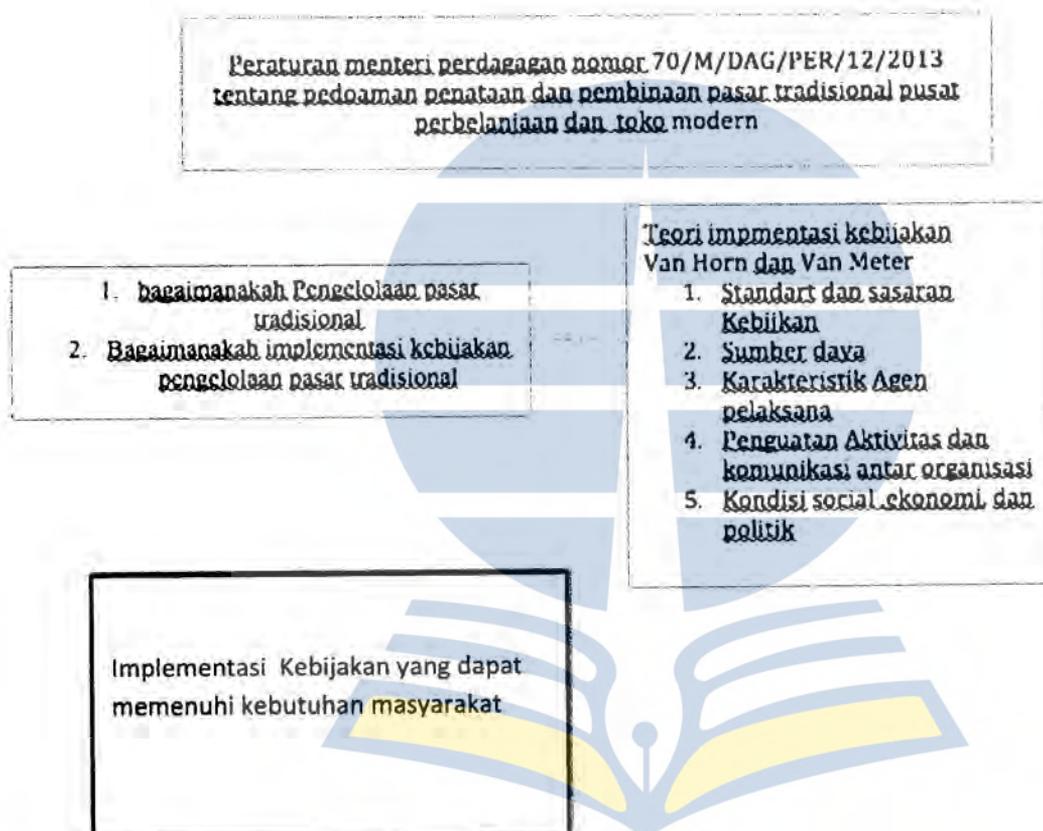
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung pernah dilakukan Pratiwi (2012). Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana kesiapan dari penerapan e-KTP di pangkal pinang dan apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat kesiapan. Metodologis Analisis dilakukan wawancara dengan warga yang ingin membuat KTP dan dinas terkait. Hasil evaluasi bahwa kota pangkal pinang berada pada tingkatan siap. Fakta yang menjadi pendukung kesiapan adalah kualitas dan jumlah sumber daya manusia, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya alat, cuaca yang kurang mendukung,serta keterlambatan alat.

Penelitian terdahulu tersebut di atas menjadi referensi dalam penelitian ini. Ada beberapa konsep yang akan diakomodir untuk memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Perbedaan penelitian yang diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi Kebijakan pengelolaan pasar, mencakup empat cakupan pengelolaan

keuangan pasar, pengelolaan pungutan retribusi pasar, pengelolaan sampah dan pengelolaan kondisi sdm pengelola pasar, beberapa peneliti hanya meneliti sebatas retribusi pasar, dan revitalisasi pasar. Metode yang digunakan juga berbeda pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, dan analisis SWOT. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan juga berbeda pada penelitian terdahulu menggunakan Edward III (1980), sedangkan peneliti menggunakan teori Van Horn Van Meter (1975)

C. Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka Di Kabupaten Tana Tidung



D. Operasionalisasi Konsep

Dari sekian pengertian implementasi yang peneliti uraikan dalam bagian kerangka teori dalam penelitian. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan pasar Imbayud Taka Kabupaten yang disampaikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu dengan melihat factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdapat hal mengenai Standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, Penguatan Aktivitas dan Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana terkait dengan kegiatan implementasi, Sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung menetapkan kebijakan pengelolaan pasar tradisional untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menata dan mengelola ruang pasar Imbayud Taka. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional perlu adanya analisis terhadap kebijakan pengelolaan pasar. Konsep dioperasionalkan terdiri dari metode Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Penguatan aktivitas & Komunikasi antar organisasi.

1. Standar dan kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran

tersebut. Standard dan Sasaran kaitannya dengan kebijakan pengelolaan pasar akan diteliti lebih lanjut dari kesesuaian standar, kejelasan sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber Daya kaitan sumber daya dengan kebijakan pengelolaan pasar akan diteliti lebih lanjut dari aspek kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana dan kecukupan anggaran.

3. Penguatan Aktivitas organisasi dan Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (1975), apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Kaitan komunikasi dengan kebijakan pengelolaan pasar akan diteliti lebih lanjut dari aspek kerja sama antar pihak terkait.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pembagian wewenang serta hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam implementasi pelaksanaan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana kaitan dengan kebijakan pengelolaan pasar akan diteliti lebih lanjut dari aspek kedisiplinan pelaksana, kesadaran pedagang, kepatuhan pengelola pasar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono. (2005 : 15) bahwa ,“Penelitian berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari dengan sungguh-sungguh. “Kemudian dalam perkembangannya, kata penelitian digunakan sebagai padanan kata atau Research dalam bahasa Inggris, yang di Indonesiakan menjadi Riset.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan membahas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Kirk dan Miler (1986 : 9), , penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006 : 15) metode penelitian kualitatif adalah :

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek dan alamiah, (sebagai lawannya adalah adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif

/kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Bogdan dan Taylor , mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki 5 (lima) ciri menurut Bogdan dan Biklen (1982 : 32), yaitu Natural Setting (dikumpulkan dari alam nyata) dalam situasi sebagaimana apa adanya dengan peneliti sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, analisis data secara induktif dan meaning (makna) merupakan perhatian utamanya.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dan hasil-hasil berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel Hasan (1990:40). Singarimbun (1995:4) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan disertai dengan interpretasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dari arti data yang telah diambil.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah bagaimana pengelolaan pasar dan implementasi kebijakan pengelolaan pasar Imbayud Taka dalam rangka pengelolaannya yang meliputi Pengelolaan Keuangan, Peningkatan Sumber daya Manusia, Pengelolaan Retribusi, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Peneliti mengambil lokasi dipasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan Pasar Imbayud Taka merupakan pasar yang potensial yang pada saat ini system pengelolaan pasar masih belum optimal.

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Penelitian ini mengambil informan dan berbagi sumber yang terkait dengan pengelola pasar khususnya pasar Imbayud Taka, informasi diambil dari orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang berperan sebagai nara sumber dan partisipan. Dengan pertimbangan, bahwa informan tersebut sepenuhnya terlibat dalam kasus pada situasi sosial yang hendak diteliti.

Ada beberapa Informan dan Informan kunci yang menjadi sumber Informasi penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan
3. Staf Bidang Perdagangan
4. Pengelola Pasar(Ketua Pasar)

5. Pedagang (2 Org)
6. Pembeli (1 Orang)

D. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2005:305) menyatakan bahwa “terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui :

1. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) di Pasar Induk Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung Serta Dinas terkait dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta gambaran empiris tentang data-data yang diperlukan itu. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas ataupun kondisi perilaku.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (Indepth interview) dengan mengacu pada pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka kepada informan yang ditentukan. Informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat suatu gejala, fenomena dan situasi.

3. Teknik Dokumentasi

Selain menggunakan teknik di atas yaitu wawancara dan observasi, dilakukan pula teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan berbagai dokumentasi tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lainnya) sebagai bahan referensi dan komparasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Panduan wawancara, digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsisten.

E. Prosedur Penelitian

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lyn (Moleong, 2001 ; 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Arikunto (2006 ; 129) menyebutkan bahwa : “ sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh “ sedangkan menurut sugiono (2007 : 156) bahwa “ bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder”. oleh karena itu data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperoleh dari berbagai data baik data primer maupun data sekunder dimana :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun pengamatan langsung oleh penulis yang sifatnya relative lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan (sample) yang penulis tentukan untuk penelitian ini. Data primer diperoleh dari informan yaitu : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten, Kepala Bidang Perindustrian, dan Perdagangan, Staf Bidang Perdagangan, Masyarakat yaitu ketua pasar dan pedagang untuk menghindari yang subjektif maka masing-masing data yang diperoleh dari informan kunci diadakan crosscheck dengan kepala Dinas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data-data tersebut seperti : buku-buku teoritis, makalah-makalah ilmiah, laporan-laporan, arsip-arsip, dan berbagai aturan dengan berbagai variabel yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber sebagai sumber data primer, Sedangkan perolehan data juga diperoleh dari sumber data yang tidak langsung kepada peneliti, misalnya dalam bentuk dokumen, data seperti ini merupakan sumber data sekunder. Maka prosedur pengumpulan data dapat dilakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data dan analisis dilakukan melalui pemilahan data, kategorisasi, pendalaman, penggunaan contoh, membandingkan dan verifikasi. Deskripsi disajikan secara naratif, berupa teks, bagan maupun tabel. Setelah naskah penelitian tersusun dalam bentuk draft, peneliti menganggap perlu untuk meminta umpan balik terlebih dahulu kepada sumber informasi untuk memperoleh kesahihan (Miles dan Huberman, 1992)

Menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2007:21) analisis meliputi tiga langkah, yaitu :

1. *Data Reduction* (Redaksi data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

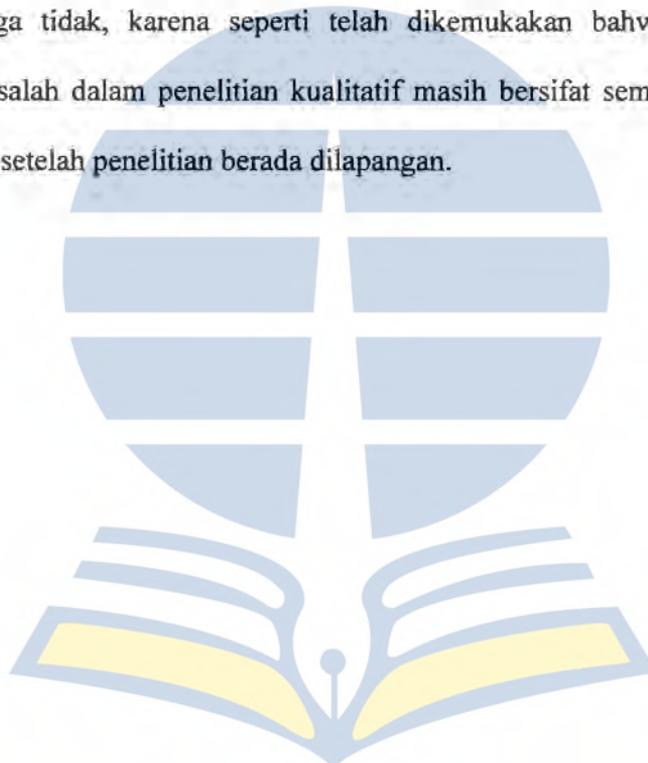
Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.

3. *Conclusion drawing/verification* (Menarik kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sejalan dengan penjelasan diatas, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten Termuda di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia yang disetujui pembentukannya pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia dengan luas wilayah 4.828,58 km² dan jumlah penduduk 22.503 jiwa, sukubangsaasliyang menduduki Kabupaten Tana Tidung adalah Tidung dan Berusu. Sejak tahun 2012 kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara seiring dengan pemekaran Provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat ini pembagian wilayah administratifnya bertambah dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan dari 23 desa menjadi 29 desa

Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah kepulauan yang memiliki keragaman bentuk , baik di daratan maupun di perairannya. Kabupaten Tana Tidung sebagian wilayah Kec. Sesayap, Kec. Sesayap Hilir, Kec. Tana Lia, Kec. Betayau dan Kec. Muruk Rian, adapun batas-batas Kabupaten Tana Tidung ; sebelah utara berbatasan dengan Kab. Nunukan ; sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi, Kab. Bulungan,

dan kota Tarakan ; sebelah selatan berbatasan dengan Kab.Bulungan ; sebelah barat berbatasan dengan Kab. Malinau. Kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas manusianya, satu ciri utama kajian geografis adalah hubungan antara fisik dan unsur non fisik yakni sosial, ekonomi, budaya dan lainnya .

b. Keadaan Penduduk dan Potensi Yang dimiliki

Pembangunan nasional dapat terwujud karena adanya dukungan dari penduduk, penduduk merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional karena sebagai modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang padat menjadi rendahnya kualitas penduduk namun jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang tinggi akan dapat menjadi modal dasar pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2014. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung adalah sebanyak 20.400 jiwa.

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Kelamin, Data Kecamatan 2014

Tahun	Penduduk			Rasio Jenis
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Kelamin/Sex Ratio
2012	9.349	7.685	17.079	122,24
2013	10.380	8.605	18.985	120,63
2014	11.300	9.100	20.400	124,18

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Jika dilihat dari data diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk cukup berarti dan masih harus bertambah mengingat luas wilayah Kabupaten Tana Tidung yang cukup luas. Perbandingan penduduk Laki-laki dan perempuan menunjukkan tingkat sex ratio pada tahun 2014 sebesar 124,18 artinya diantara 124,18 penduduk laki-laki Kabupaten Tana Tidung terdapat 100 penduduk perempuan. Tingkat sex ratio ini bervariasi pada seluruh kecamatan. Struktur penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan jenis kelamin menunjukkan posisi yang hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki 53,23% dan perempuan 46,77%. Dalam kurun waktu 5 tahun perkembangan jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Tana Tidung lebih cepat jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk perempuan.

Kondisi ini menjelaskan bahwa Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi sumber daya manusia yang cukup baik jika dikaitkan dengan penduduk kelompok yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dari kelompok dewasa perempuan.

Penduduk Kabupaten Tana Tidung terdiri dari penduduk pribumi yaitu penduduk yang berasal dari suku tidung dan suku belusu, disamping itu juga, penduduk Kabupaten Tana Tidung dilengkapi berbagai penduduk lain yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dari aspek pembauran dan interaksi antar etnis telah berhasil menciptakan ikatan kohesif pada masyarakat majemuk yang kondusif serta kokoh dalam persatuan dan kesatuan faktor tersebut sangat mendukung visi dan misi Kabupaten Tana Tidung.

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari :

a. Produk Ikm

Sampai tahun terakhir tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung terdapat 124 industri kecil dan menengah. Lima jenis komoditi unggulan daerah yang dihasilkan industri kecil dan menengah meliputi industri pengolahan perikanan, pertanian, perkebunan, kerajinan, makanan.

b. Pariwisata

Kabupaten Tana Tidung mempunyai beberapa obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan. Di Kabupaten Tana Tidung 3 obyek wisata, dengan perincian obyek wisata sebagai berikut:

- 1). Obyek wisata alam yaitu air terjun gunung rian, batu mapan, rongkang, air panas buang baru
- 2). Obyek wisata sejarah dan budaya, kampong hilang desa menjelutung
- 3). Obyek wisata agro, kebun sayur

c. Fasilitas Ekonomi

Kabupaten Tana Tidung menyediakan sarana dan prasarana perekonomian dua pasar yaitu, Pasar Imbayud Taka di desa tideng pale dan Pasar Kujau di desa kujau. Di Kabupaten Tana Tidung belum memiliki lembaga keuangan dan pusat-pusat perbelanjaan modern.

c. Keadaan Penduduk Kabupaten Tana Tidung

Hampir sebagian penduduk Kabupaten Tana Tidung mata pencahariannya adalah nelayan dan petani karena wilayah Kabupaten Tana Tidung yang daratannya luas dan mempunyai banyak anak sungai. Dan

sebagian lagi UKM, IKM dan PNS. Adapun Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2014 sebanyak 1508 orang.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di bidang pendidikan juga sangatlah besar hal ini dibuktikan dengan telah selesainya pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah keatas pada akhir tahun Anggaran 2014/2015.

Gedung sekolah di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 39 orang yang terdiri dari 1 sekolah TK, 27 sekolah SD, 8 sekolah SMP dan 3 sekolah untuk SMA. Dari jumlah tersebut telah tertampung 3.495 peserta didik yang sedang bersekolah dengan rincian 56 murid TK, 2.664 murid SD, 1.007 murid SMP dan 768 murid SMA. di peroleh dari data BPS Kabupaten Tana Tidung.

d. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung selalu mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi fluktuasi disetiap tahunnya, pada periode tahun 2010 kondisi perekonomian sangat baik dengan capaian pertumbuhan 4,05 % sedangkan dua tahu berikutnya terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 0,91 % ditahun 2011 dan 0,95 % ditahun 2012. Ditahun 2013 situasi perekonomian Kabupaten Tana Tidung kembali mengalami peningkatan dengan ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi 6,13 %. Ditahun 2014 perekonomian di Kabupaten Tana Tidung kokoh dengan pertumbuhan 6,38 %. Untuk tahun 2015 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung masih menunggu data dari Bagian ekonomi dan pembangunan.

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Tana Tidung antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, retribusi jenis jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi pendapatan pemerintah daerah tahun 2014, total pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 1,057 Milyar, sedangkan total belanja daerah Kabupaten Tana Tidung 1,047Milyar.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 (Juta Rupiah)

No	Rincian	2014
1	Pajak Daerah	2.313
2	Retribusi	199
3	Biaya laba BUMD	7.788
4	Penerimaan Lain-lain	35.462
	Jumlah Total	
	2014	45.762
	2013	334.702
	2012	28.904

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 305.798 juta rupiah, dikarenakan ada beberapa perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit yang baru. Kemudian terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 288.94 juta rupiah. Penurunan terjadi diakibatkan karena ada beberapa perusahaan tambang batu bara yang tutup. Sehingga terjadi pengurangan penerimaan pajak daerah. Dari penjelasan mengenai retribusi diatas dapat dilihat bahwa retribusi pasar belum berjalan karena belum ada data penerimaan dari BPS mengenai retribusi pasar.

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2014, Kabupaten Tana Tidung berada pada ranking ke-4 di provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan.

2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Pj. Bupati yaitu Bapak Ir. Zaini Anwar,MM sampai pada saat Bupati definitive terpilih. Pada Tahun 2010 yang terpilih menjadi bupati Kabupaten Tana Tidung yang pertama yaitu Bapak Dr.H.Undunyah,M.H,M.Sie beserta Wakilnya Yaitu Bapak Markus,SE. Selama masa jabatan beliau banyak program dan kegiatan yang mereka laksanakan dan Pada Tahun 2016 ini terpilihlah kembali untuk kedua kalinya Bapak Dr.H.Undunyah,M.H,M.Sie Sebagai Bupati Tana Tidung dan Bapak Markus,SE sebagai Wakilnya.

Visi Kabupaten Tana Tidung saat ini adalah **“Pemerataan Infrastruktur wilayah untuk Penguatan Layanan Dasar dan menuju Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah yang mandiri”**.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, maka Kabupaten TanaTidung mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sanitasi dan air bersih
6. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaran Penataan Ruang dan Lingkup Hidup
7. Pengembangan Agro Industri
8. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal
9. Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
10. Peningkatan Kualitas Sadar Hukum Masyarakat
11. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diharapkan terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan UUD 45, disamping itu juga penelitian yang diteliti ini sudah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati saat ini yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu pendidikan.

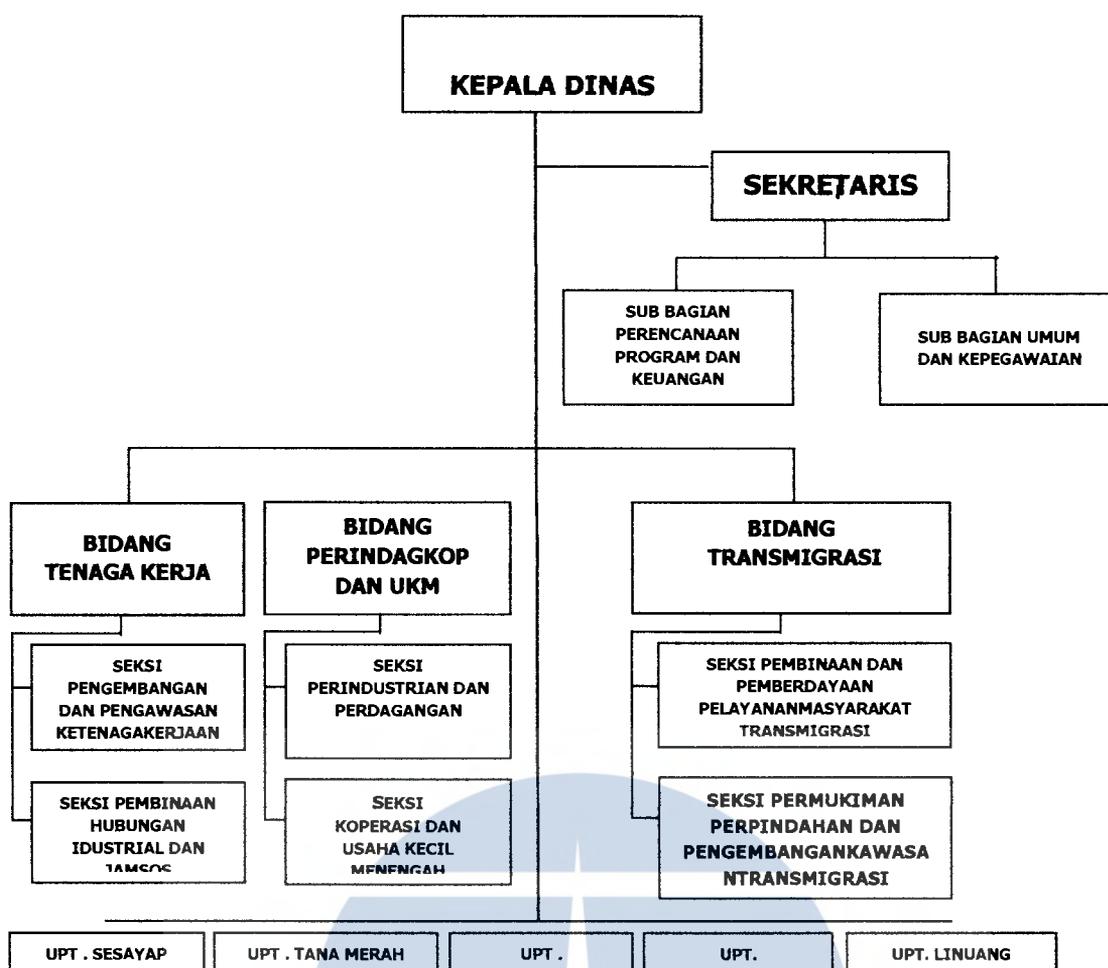
3. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi

Ada pun Visi Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Tana Tidung. Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi yaitu, ***“Terwujudnya Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi yang Berkualitas, Kompetitif, Mandiri dan Sejahtera”***. Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Transmigrasi dengan mengoptimalkan SDM dan Pengelolaan Administrasi Yang Baik.
- b. Mewujudkan Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran yang Berkualitas dan Kompetitif.

- c. Mewujudkan Harmonisasi dalam Dunia Usaha melalui Kemitraan Kelembagaan dan Ketenagakerjaan.
- d. Mewujudkan Usaha ekonomi produktif yang kompetitif dan berwawasan lingkungan serta bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas.
- e. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan berlangsungnya investasi produksi serta distribusi barang dan jasa.
- f. Mewujudkan Pertumbuhan Peningkatan dan Pengembangan Koperasi menuju koperasi yang berkualitas dan kompetitif.
- g. Mewujudkan kualitas pelayanan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan pemukiman strategis cepat tumbuh mandiri





Bagan 4.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung.

KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - b. Pembinaan dan pengendalian program tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. Merumuskan program kerja dan anggaran dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - c. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyelenggarakan urusan umum dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi;
 - f. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
 - g. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional dinas;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;

- i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang penulis teliti selain mempunyai tugas pokok Kepala Dinas merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam penelitian ini, Kepala Dinas sebagai salah satu pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Sangat besar pengaruh terhadap semua kegiatan yang ada di SKPD terutama masalah pasar terkait dengan masyarakat dan juga SKPD yang lainnya. Kepala dinas sebagai leader dalam pengambilan suatu keputusan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi baik kemasyarakat maupun kepada aktor yang terlibat dalam impelentasi kebijakan pasar.

SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan dapur umum bagi semua bagian, tugasnya lebih memfokuskan pada kegiatan administrasi kepegawaian dalam hal ini tidak terkait langsung dengan penelitian ini. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, sub bagian secretariat ada dua sub yaitu bagian tata usaha dan bagian program. Bagian tata usaha merupakan bagian yang mengurus tentang kepegawaian baik dari menyiapkan slip gaji, gaji berkala, daftar hadir. Bagian program yang menyiapkan beberapa program yang diusulkan dari masing-masing bidang pada SKPD

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan.
3. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Sekretariat meliputi :
 - a. Menyusun program dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan subbagian-subbagian;
 - b. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan dinas;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan dan masukan dari masing-masing unit kerja dilingkungan dinas;

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian perencanaan program dan keuangan merupakan bagian yang penting didalam suatu SKPD. Bagian ini bertugas merencanakan dan menyiapkan rencana kerja awal dan program-program yang diusulkan masing-masing bidang. Bagian keuangan juga merupakan bagian yang bertugas melaksanakan pengendalian teknis perencanaan keuangan, pengelola anggaran dan belanja pegawai.

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi program dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan meliputi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
 - d. Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan;
 - e. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
 - f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
 - h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum dan kepegawaian merupakan bagian dari sekretariat yang bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian administrasi umum dan

kepegawaian, memberikan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol dan perpustakaan;

- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi;
- f. Melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi memiliki dua Bidang yaitu Bidang Perindustrian dan perdagangan serta bidang Koperasi dan UKM. Masing-masing bidang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Untuk bidang Perindustrian dan perdagangan juga mempunyai tugas yang berbeda. Bidang perindustrian lebih menekankan pada pembinaan, pelatihan kepada masyarakat agar dapat membuka usaha baru. Bidang perdagangan lebih menekankan pada promosi produk daerah, pengawasan peredaran barang dan jasa, pengelolaan pasar. Selain itu bidang Koperasi dan UKM juga mempunyai tugas yang berbeda. Bidang Koperasi lebih menekankan kepada pembentukan dan pembinaan koperasi. Bidang Usaha Kecil dan Menengah lebih menekankan pembinaan dan pengawasan UKM.

1. Bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
2. Bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM meliputi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
 - e. Melakukan pengawasan dan penertiban dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Seksi Perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang perindagkop dan UKM dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan;
2. Seksi perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi perindustrian dan perdagangan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Seksi perindustrian dan perdagangan Meliputi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis perindustrian dan perdagangan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perijinan industri dan perdagangan;
- f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan industri dan perdagangan;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Seksi Perindustrian dan perdagangan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini khususnya bidang perdagangan, salah satu aktor yang terlibat dalam penelitian ini yaitu staf bidang perdagangan yang mempunyai tupoksi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pasar.

SEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Seksi Koperasi dan Usaha kecil menengah mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang perindagkop dan UKM dalam menyiapkan bahan

koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang koperasi dan UKM;

2. Seksi koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis pembinaan dan pengendalian teknis Seksi Koperasi dan UKM;
- b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi seksi Koperasi dan UKM;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Seksi koperasi dan UKM meliputi :

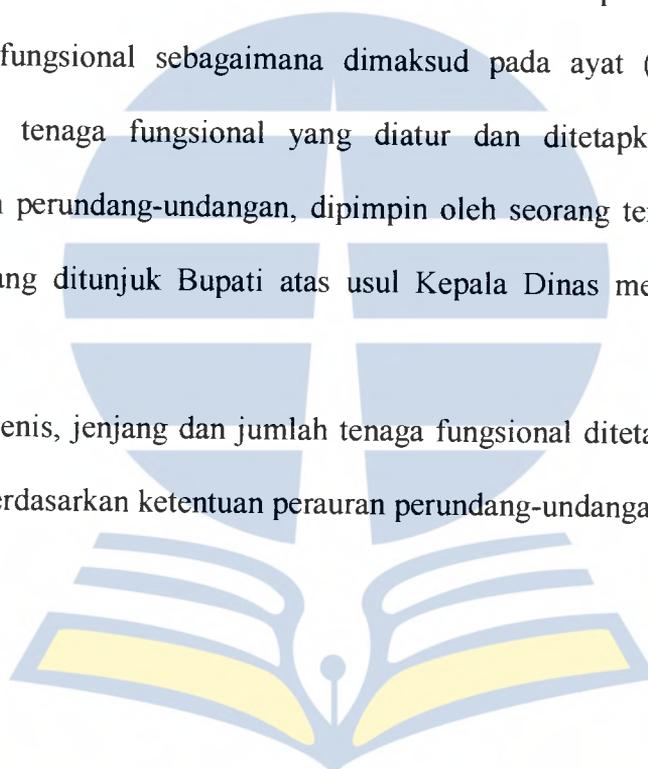
- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang koperasi dan UKM;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta pengelolaan perijinan Koperasi dan UKM;
- f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan koperasi dan UKM;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Koperasi dan UKM disini bertujuan untuk membina, membantu pembentukan koperasi baik koperasi mandiri maupun simpan pinjam, juga pembinaan dan pengawasan terhadap UKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dapat di tetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan;
2. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
3. Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 4.3
Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung
(Tahun 2016)

Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	LK	PR	Jumlah
1. Kepala Dinas	1	-	1
2. Sekretariat			
a. Sekretaris	1	1	1
b. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
- PNS	2	3	5
- Tenaga Honor	6	3	9
c. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	1	-	1
- PNS	2	6	8
- Tenaga Honor	-	2	2
3. Bidang Tenaga Kerja	1	-	1
a. Kepala Bidang Tenaga Kerja	1	-	1
b. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2	-	2
- PNS	1	2	4
- Tenaga Honor	1	-	1
c. Kepala Seksi HI dan Jamsostek	1	-	1
- PNS	1	1	2
- Tenaga Honor	1	-	1
4. Bidang Perindagkop			
a. Kepala Bidang Perindagkop	1	-	1
b. Kepala Seksi Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-
- PNS	3	4	7
- Tenaga Honor	1	1	2
c. Kepala Seksi Koperasi dan UMKM	1	-	1
- PNS	1	3	4
- Tenaga Honor	-	1	1
5. Bidang Transmigrasi			
a. Kepala Bidang Transmigrasi	1	-	1
b. Kepala Seksi P4KT	1	-	1
- PNS	2	1	3
- Tenaga Honor	-	1	1
c. Kepala Seksi P2MKT	-	1	1

- PNS	1	-	1
- Tenaga Honor	2	1	3
d. KUPT (PNS)	2	-	2
	1	-	1
Total			67

Sumber : Data LAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulan bahwa, tupoksi ataupun bagian kerja dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi sudah begitu jelas, sehingga kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan pasar akan sangat sulit ditemui karena telah mempunyai orang-orang yang faham tentang pengelolaan pasar dalam hal pengimplementasian pasar tradisional, terbukti dengan pemaparan bagian staf Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung :

“Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kami menemukan beberapa hambatan dan kendala yaitu anggaran. Selama ini belum ada anggaran khusus untuk mengelola pasar. Anggaran yang digunakan masih mengikuti anggaran kegiatan lain dibidang perdagangan yaitu anggaran monitoring Sidak sembako, sedangkan dipasar perlu banyak pembenahan baik dari Sarana dan Prasarana maupun sistem pengelolaan pasarnya, jika dibandingkan dengan tenaga pengelola dibidangnya sangatlah mencukupi dan memadai, saya yakin jika kucuran dana yang tersedia memang melebihi, pasar tersebut cepat pembangunan dan perkembangannya, karena di kelola baik oleh sumber daya manusia yang memang berkompeten didalamnya.”

Dari tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa dari peta jabatan dengan kebutuhan staf sudah memenuhi peta jabatan atau standar pelayanan minimal berdasarkan jenis kelamin ideal atau berimbang antara laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya yang perlu mendapatkan penekanan khusus adalah peningkatan kompetensi staf yang distandarkan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kebutuhan Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi, sehingga pelayanan publik untuk penyelesaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan dengan baik dan benar.

Dari komposisi di atas, jumlah personil Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung yang berjumlah 67 orang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 48 orang
- Tenaga Honor Daerah : 19 orang

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung

Sejak Tahun 2007 sampai tahun 2015 kemajuan pembangunan, Infrastruktur serta pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung ini sangat pesat dapat dilihat dari pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas umum dan Kesehatan. Akan tetapi fasilitas pendukung terutamapasar masih belum memadai, padahal salah satu motor penggerak pembangunan dan perekonomian nasional dalam bidang perdagangan adalah pasar tradisional.

Kabupaten Tana Tidung memiliki 2 pasar tradisional yaitu pasar Imbayud Taka yang terletak di jalan Jendral Sudirman desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap dan Pasar Betayau yang terletak didesa trans kujau kecamatan Betayau.

Penelitian ini dilakukan dipasar Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung yang berdiri pada Tahun 2007, luas lahan 300 m² dan luas bangunan 148 m². Pasar Imbayud Taka memiliki 54 los dengan ukuran lebar 1 m panjang 1,5 m dan 32 kios dengan ukuran panjang 8 m dan lebar 2,4 m jumlah pedagang yang berjualan sebanyak 86 orang. Adapun sarana dan prasarana fasilitas pasar antara lain, toilet, selang air, mesin air Alkon, jaringan instalasi listrik. Komoditi yang diperjualbelikan dipasar tersebut berupa kebutuhan bahan pokok, sayur mayur, ikan daging ayam, dan alat-alat pertanian.

Pasar merupakan Fasilitas pendukung yang diprioritaskan karena dengan adanya pasar tradisional dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Di Kabupaten Tana Tidung hampir 5 % masyarakat pekerjaannya adalah PNS, selain itu Petani dan nelayan. Jadi selama ini pasar itu ramai dikarenakan konsumennya yang paling banyak adalah dari kalangan PNS. Salah satu factor yang menyebabkan pasar sepi dan ramai menurut pendapat sebagian pedagang tergantung dari keuangan mereka, apabila PNS belum menerima Gaji atau tunjangan pasti kondisi pasar sepi begitupun sebaliknya. Untuk itulah diperlukan juga sistem pengelolaan pasar yang baik walaupun sepi pasar tetap bersih, aman, dan nyaman bisa jadi dengan kondisi pasar yang bersih tidak kotor dan bau, pasar bisa ramai tidak hanya tergantung dari keuangan PNS saja. Dapat dikatakan bahwa aktivitas pasar juga dipengaruhi oleh pendapatan PNS.

Permasalahan dipasar sangatlah banyak selain dari produk yang dijual juga sistem pengelolaan pasar yang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal. Sistem pengelolaan Pasar Imbayud Takamencakup : Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Retribusi, Serta Pengelolaan SDM, Sementara itu untuk menanggulangi permasalahan ini perlu adanya teknis pengelolaan pasar:

1. Pengelolaan Keuangan Pasar

Selama ini yang terjadi dipasar adalah sistem pengelolaan keuangan belum berjalan, untuk itu perlu adanya pembentukan koperasi untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu juga perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi mengenai pembukuan keuangan pasar.

2. Pengelolaan Pungutan Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Pajak berbeda dengan retribusi, Meskipun pajak dan retribusi berbeda namun keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber pendapatan. Contoh retribusi antara lain karcis parkir kendaraan, karcis pasar, karcis masuk terminal, dan lain-lain

Retribusi Pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya Dinas Tenaga, Perindagkop, dan Transmigrasi harus secepatnya membentuk tim lintas sektoral untuk mengeluarkan retribusi pasar, Karena selama ini sebenarnya pemerintah daerah bisa saja menerima hasil retribusi pasar dari tahun 2007 sampai sekarang bisa diperkirakan berapa besar pemasukan daerah dari Retribusi pasar sampai tahun 2015.

3. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional khususnya di pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Sampah pasar memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan sampah dari perumahan. Komposisi sampah pasar lebih dominan sampah organik. Sampah-sampah plastik jumlahnya lebih sedikit daripada sampah dari perumahan. Apalagi jika sampahnya berasal dari pasar sayur atau pasar buah-buahnya. Limbahnya lebih banyak sampah organiknya. Untuk sampah-sampah dari pasar, lebih khusus lagi sampah-sampah dari pasar sayur dan buah. Sampah pasar dapat diolah menjadi kompos dan pupuk organik. Untuk Kasus yang terjadi di Tana Tidung sampah masih banyak terlihat berceceran dimana-mana di depan pasar, diparit-parit dan dibelakang pasar.

4. Pengelolaan Kondisi SDM Pengelola pasar

Permasalahan terkait kondisi Sumber Daya Manusia pada umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan yang terkait pengelolaan operasional pasar. Dalam rangka untuk mendorong profesionalisme pasar perlu disusun pedoman pengelolaan pasar pedoman ini diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan bagi pengelola pasar, pengelola pasar harus profesional dan transparan.

Didalam pengelolaan pasar terdapat juga unsur-unsur manajemen melalui proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penetapan tenaga kerja (*Accuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) untuk mencapai suatu sasaran kebijakan yang diinginkan. Pada penelitian ini peneliti lebih meneliti kearah pengorganisasian, adapun termasuk didalamnya unsur pengawasan dari pihak dinas. Pada pasar Imbayud Taka semua unsur ini belum bisa terealisasi dengan baik dan kurang maksimal, belum tercapainya tujuan kebijakan. Pada umumnya pasar mempunyai sistem pengelolaan pasar tetapi pasar Imbayud Taka belum mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan Keuangan yang belum jelas dan masih menggunakan pembukuan sederhana, pengelolaan retribusi pasar peraturan Bupati sudah ada tetapi SK pembentukan Tim belum berjalan, pengelolaan Sampah yang masih belum jelas tupoksinya siapa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah, pengelolaan Sumber daya SK pembentukan ketua pasar ada tetapi tidak berjalan dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka

Implementasi kebijakan merupakan ketentuan perundangan undangan yang harus dilaksanakan secara hirarki mulai dari pusat dan daerah serta harus ada sinkronisasi dalam melaksanakan kebijakan dengan harapan apa yang di program dari bawah keatas bisa sejalan sehingga penggunaan biaya yang terkait dengan kebijakan itu bisa efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut perlu adanya kerjasama pemerintah dan pengambil kebijakan yang lainnya, dengan adanya kerjasama ini tujuan dari kebijakan dapat diterima oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik.

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau Faktor dan masing-masing variabel atau factor saling berhubungan satu sama lain. Program pengelolaan pasar yang ditujukan untuk mengelola dan menata pasar tradisional.

Berikut ini penulis membahas tentang implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung yang didasarkan pada hasil data lapangan.

2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran kebijakan dari pengelolaan pasar adalah menata, membina dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat mendukung pendapatan Asli Daerah. Sasaran kebijakan yang dimaksud disini adalah pasar tradisional dan pelaku pasar yang terdiri dari pedagang dan ketua pasar.

Adapun pada kasus Pasar Imbayud Taka ini kebijakan-kebijakan belum berjalan maksimal, banyak kebijakan yang diambil oleh pemda kemudian tidak dijalankan oleh pedagang. Dimana dalam pembangunan pasar Imbayud Taka tidak mempunyai kriteria atau standar khusus.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi¹⁾ bahwa :

“Pasar Imbayud Taka belum memenuhi standar pasar Karena pasar ini dibangun tahun 2007, pasar ini dibangun pada saat Tana Tidung masih dalam status kecamatan oleh karena itu standarnya ya standar kecamatan bukan standar kabupaten kami berharap kedepan Bupati kita lebih memperhatikan masalah pasar dan pembangunannya, karena pasar merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tana tidung.”

Dari pernyataan di atas sebaiknya pemerintah daerah maupun SKPD Yang terkait menjadikan Peraturan menteri sebagai landasan dalam mengembangkan pasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

¹⁾Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, & Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

DAG/PER/8/2013 tentang pedoman sarana dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Dalam PERMENDAG ini diklasifikasikan tipe-tipe pasar yang sesuai dengan keadaan suatu daerah .selain peraturan menteri Van Horn juga menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan salah satunya adalah penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi. Maka perlu adanya komunikasi antar SKPD Di Kabupten Tana Tidung ini terkait dengan pengembangan pasar selain itu aktivitas-aktivitas yang saling berkesinambungan dalam pengembangan dan pengelolaan pasar imbayud Taka.

Di sisi lain pemerintah daerah juga berupaya utuk menjalankan kebijakan Pemerintah pusat yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisonal (Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013).

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi²) bahwa:

“Kita Berupaya untuk menjalankan Kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan menyesuaikan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, seperti tahun ini bahwa pemerintah pusat dalam nawacitanya akan merevitalisasi dan membangun 5000 pasar tradisional kedepan kita akan coba mengajukan dana DAK atau TP untuk pembangunan pasar baru dan merevitalisasi pasar yang sekarang, pembangunan ini tdak terlepas dari keinginan kebijakan permendag tersebut ”

Pada dasarnya pemerintah pusat sedang berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan pasar tradisonal di seluruh Indonesia yang tertuang dalam misi Presiden, yaitu Nawacita namun perlu di perhatikan lagi adalah perlu

²Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, & Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

di tingkatannya komunikasi antar, organisasi publik yang berkaitan dengan pasar. baik dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten dan Kecamatan. hal ini diperkuat oleh point penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn dalam model proses implementasi kebijakan. Terkait dengan itu perlunya komunikasi dijalankan agar tujuan dari kebijakan ini tepat sasaran. yang terjadi di lapangan adalah kurang berjalannya komunikasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi Permendag tersebut sehingga masih perlu dievaluasi, seperti yang terjadi di lapangan hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan³) bahwa:

“ Selama ini kami berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan permendag No.70 /M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar, dalam hal ini penataan produk dagang agar lebih rapi dan terlihat indah, pada awalnya semua menanggapi sosialisasi ini satu bulan kemudian sudah terjadi perubahan kembali semrawut malah ada penambahan meja pasar yang dibuat oleh pengelola pasar”.

Berkaitan dengan hal tersebut van Meter dan van Horn menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, lingkungan sosial juga mempengaruhi kebijakan tersebut. serta sikap para pelaksana kebijakan sehingga fenomena yang terjadi di lapangan ini mencerminkan bahwa sasaran dari kebijakan tersebut belum maksimal. di karenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Sikap pelaksana kebijakan sangat diperlukan selain melakukan sosialisasi, PERMENDAG tersebut seharusnya dilakukan pengawasan secara berkelanjutan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal. Tahun 2005 Atmoko melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan pengelolaan pasar di

³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

Kota Bandung . peneliti mengungkapkan bahwa revitalisasi pasar menjadi sebuah instrument untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat. Menegakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten misanya yang menyangkut tata ruang, alihguna lain lahan, perizinan bagi pasar modern, ketentuan batas minimal jarak pasar modern dari pasar tradisional. Dari temuan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi pengelolaan pasar di imbayud taka Di kabupaten Tana Tidung. Sebenarnya ada kemiripan yang terjadi di daerah ini. Sehingga temuan ini menjadi rujukan bagi peneliti. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan pasar di Kabupaten Tana Tidung.

Permasalahan pengelolaan pasar imbayud taka ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pedagang dan masyarakat sebagai pengguna pasar ini, agar mampu mewujudkan kondisi pasar yang nyaman sesuai dengan tujuan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah, agar pengelolaan pasar ini dapat terorganisir dengan baik maka pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan Penggunaan Kios dan los, yaitu Surat Keterangan Penggunaan Kios dan Los (SKPKL). Dimana SK ini sebagai bukti terhadap pedaganag yang beraktivitas menggunakan pasar sebagai tempat usaha. Namun temuan di lapangan terkait SKPKL ini masih mengalami beberapa permasalahan yang mendasar.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Staf Pelaksana Pasar⁴) bahwa :

“ Pada Awal terbentuknya pasar kami membuat sebuah surat pernyataan yaitu SKPKL dalam bentuk Formulir dan Surat yang lengkap, untuk

⁴Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

pembagian los dan kios pasar kami lakukan pengundian agar adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antar pedagang. Saat ini penempatan Los & Kios sudah tidak sesuai dengan lot awal kami sedang berupaya untuk menindaklanjuti ”

pembagian kios dan los yang tidak merata menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah , pernyataan diatas juga di dukung oleh pedagang yang melakukan kegiatan dipasar tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh pedagang sayur ⁵) bahwa :

“Sepengetahuansaya memang pedagang yang memiliki surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los sudah tidak sesuai, sekarang saja pemiliknya satu orang bisa memiliki 3 meja los dan ada yang disewakan serta diperjual belikan “

Sependapat juga dengan pedagang pertama menyatakan bahwa kios dan los sudah berpindah ke tangan yang lain bahkan terjadi 1 orang memiliki 3 los,

Begitu Juga yang dikemukakan pedagang Ikan ⁶) bahwa :

“ Ada isu jual beli los dan kios itu benar mbak, saya mengalaminya sendiri 5 tahun yang lalu saya membeli los seharga 5 jt , sekarang mungkin 7jt bahkan lebih. Pemilik los awal itu bukan saya , karena saya butuh dan kebetulan losnya kosong jadi saya beli mbak dengan harga seperti itu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pertama hampir sama dengan pernyataan pedagang kedua bahwa berpindah tangannya kios dan los memang benar terjadi karena hal itu dialami sendiri oleh pedagang kedua. Dengan membeli los seharga 5 jt kepada ketua pasar maka los yang kosong di isi pedagang kedua.

⁵Hasil wawancara dengan Pedagang Sayur, 15 April 2016

⁶Hasil wawancara dengan pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

Dari ketiga hasil wawancara ini belum adanya tindakan yang tegas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi untuk mengatasi permasalahan ini. Seharusnya lebih ditekankan sesuai dengan perjanjian awal apabila los dan kios tidak digunakan selama satu bulan diharapkan dikembalikan kedinas dan selama 3 bulan tidak mengindahkan SKPKL nya dicabut dan diberikan sanksi hukum yang keras. Kenyataannya tidak bahkan masalah ini dibiarkan berlarut-larut oleh Dinas. Karena dibiarkan berlarut-larut muncul lagi indikasi Jual beli kios dan los yang dilakukan pedagang dan ketua pasar hal ini sudah menyalahi aturan yang berlaku, karena barang milik negara tidak boleh diperjualbelikan dan merupakan salah satu tindakan korupsi.

Dari adanya Implementasi kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tentu khususnya mengenai pengelolaan pasar tentunya ada harapan-harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Didalam mengimplementasikan kebijakan terdapat harapan-harapan yang diinginkan semua pihak yang terlibat.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi⁷) bahwa:

“ Harapan kita semua, orang yang berada dipasar baik, pengelola pasar, pedagang, pembeli, semua merasa enak, aman, tertib, nyaman dan senang dengan berada di pasar tidak ada kesan begitu pulang kerumah pasar bau dan kotor membuat kita mual dan pusing. Kondisi pasar Imbayud Taka masih jauh dari harapan masih ada keluhan-keluhan seperti bau dan kotor, Oleh karena itu kita akan mencoba pasar dikelola oleh UPTD atau

⁷Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

kedepannya kita akan bentuk Dinas Pasar dengan adanya Dinas Pasar ini bisa lebih fokus dalam mengelola dan menangani masalah pasar”

pada dasarnya apa yang di harapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan merupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, namun untuk memaksimalkan kebijakan tersebut tepat sasaran sesuai harapan dari Kepala Dinas, maka perlu di bentuknya pengelola pasar yang dimana pengelola ini khusus untuk mengelola pasar. sehingga peran dan fungsinya lebih jelas dan dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pasar. Menurut S. Grindle (1980) sebagai keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan hingga tercapainya hasil, tergantung aktivitas program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain itu dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*contex of Implementation*). Maka Pemerintah perlu memperhatikan program-program dalam pengelolaan pasar agar harapan-harapan pemerintah ,pedagang dan masyarakat dapat terwujud.

Seperti Juga yang dikemukakan Oleh Kepala Bidang Perindustrian dan perdagangan ⁸⁾ bahwa:

“ Saya berharap supaya pedagang lebih menjaga lingkungan sekitarnya agar lebih terlihat bersih dan produk yang dijual bersih dari debu dan tertata rapi, begitu juga dengan ketua pasar saya berharap dapat mengelola pasar dan lingkungan pasar dengan baik sehingga tercapai tujuan kita pasar bersih dan nyaman“

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang perindustrian dan perdagangan beliau mengharapkan agar pedagang pasar menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekitar kios dan los masing-masing maupun di lingkungan pasar. Untuk produk yang dijual perlu ditata dengan rapi agar produk terlihat indah

⁸⁾Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

tidak membosankan, dan kebersihan produk juga perlu dijaga dari kotoran dan debu, sehingga pembeli betah dan nyaman di pasar.

Seperti juga yang dikutip oleh Staf pelaksana Pasar⁹⁾ bahwa:

“Harapan saya kepada Pemerintah Daerah menyetujui anggaran Program dan kegiatan mengenai pasar agar pasar dapat dikelola dengan baik, dengan adanya anggaran kita bisa bertindak cepat”

Adapun harapan yang diinginkan oleh staf pelaksana pasar mengenai anggaran, mengharapkan sekali dukungan pemerintah daerah berupa anggaran untuk menjalankan kebijakan dan program kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Begitu juga yang dikemukakan oleh pedagang Ikan¹⁰⁾ bahwa :

“ Harapan saya kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan kami pelaku pasar, terutama fasilitas kami di pasar dan masalah pengelolaan keuangan pasar yang belum jelas kemana arahnya”

Adapun harapan pedagang diatas bahwa mereka perlu perhatian dari pemerintah terutama sarana dan prasarana seperti wc dan air bersih, dan juga masalah kejelasan keuangan pasar yang selama ini dipungut uang jaga malam dan uang kebersihan pasar.

Seperti juga yang dikutip dari hasil wawancara pedagang Sayur¹¹⁾ bahwa :

“ Saya berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi bisa menertibkan pedagang Kaki Lima dan pedagang keliling untuk masuk berjualan dilokasi pasar karena los untuk pasar ikan baru terisi 4 meja dari 8 meja ikan, pasar sayur dan ikan menjadi sepi karena pembeli lebih memilih untuk membeli di PKL karena mudah terjangkau dan pedagang keliling yang praktis datang langsung kerumah-rumah”

⁹⁾Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

¹⁰⁾Hasil wawancara dengan pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

¹¹⁾Hasil wawancara dengan pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

Berbeda dengan harapan pedagang kedua yang menunjukkan bahwa perlu ditertibkannya pedagang keliling dan pedagang kaki lima yang selama ini berjualan. Maksudnya disini agar pasar menjadi ramai sebaiknya PKL dan PK dilokalisasikan dipasar pedagang merasa tidak adil pasar sepi pembeli karena jangkauan pembeli lebih mudah diPKL dan pedagang keliling langsung kerumah-rumah.

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan pembeli¹²) bahwa:

“ Harapan saya kedepannya pemerintah dan pelaku pasar lebih memperhatikan masalah kebersihan, pasar yang bersih akan membuat kita untuk berlama-lama berbelanja dipasar, untuk pedagang sebaiknya barang yang dijual lebih beragam dan variatif agar pembeli puas belanja karena kebutuhan terpenuhi”

Adapun pembeli mengharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan mengenai masalah pasar karena pasar merupakan fasilitas pendukung dari setiap Kabupaten. Bagi pedagang sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan pasar khusus kios dan los pedagang itu sendiri.

Dari hasil wawancara diatas memberi makna bahwa harapan-harapan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi, Pengelola Pasar, Pelaku Pasar, untuk itu perlu bekerjasama dengan baik dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar dan sistem pengelolaan pasar yang professional.

Berdasarkan Uraian diatas, terlihat bahwa terkait dengan teori Van Horn Varn Meter dari sisi factor standar dan sasaran kebijakan untuk menciptakan pasar tradisional yang berkualitas dan nyaman belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Karena pasar Imbayud Taka dibangun pada saat Kabupaten Tana Tidung masih

¹²Hasil wawancara dengan pembeli Kabupaten Tana Tidung, 16 April 2016

status Kecamatan dengan bentuk, dan fasilitas seadanya untuk itu perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan pasar, apakah dengan merevitalisasi pasar yang ada atau membangun kembali pasar yang baru, dan revitalisasi dan pembangunan pasar tidak terlepas dari kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Untuk pedagang perlu adanya pembinaan mengenai pengetahuan tentang pasar, bagaimana menata dan menjaga kebersihan pasar. Agar konsumen yang datang ke pasar senang melihat produk-produk yang dijual tertata rapi dan indah. Bagi ketua pasar diberikan pelatihan mengenai pengelolaan pasar. Disamping itu juga para pelaku pasar perlu diberikan pemahaman bahwa pasar Imbayud Taka adalah milik negara jadi tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan, apabila tindakan itu dilakukan akan diberikan sanksi hukum keras dan tegas dengan mencabut Surat SKPKL dan hukuman penjara baik untuk pedagang, begitu juga diberlakukan sama terhadap ketua pasar.

2.2 Sumber Daya

Dalam Proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan Sumber daya yang tersedia, Sumber daya itu menyangkut dana, waktu dan sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya kebijakan tersebut Manusia sebagai sumber daya yang menentukan keberhasilan proses implementasi. Kebijakan ini menuntut sumber-sumber daya yang berkualitas sehingga tujuan implementasi kebijakan tercapai. Sumber daya financial merupakan sumber yang penting karena jika sumber daya manusia sudah

kompeten namun tidak tersedia dana melalui anggaran maka akan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan public

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Dalam kaitannya dengan SDM ,seperti dikutip dari Hasil Wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi¹³⁾ bahwa:

“ Apabila kita melihat saat ini dinas kami kekurangan tenaga sehingga sampai saat ini kami tidak bisa mengontrol bagaimana pengelolaan pasar itu sebenarnya, walaupun banyak informasi negative tentang penempatan pedagang pasar. Dengan jumlah 4 orang staf yang ada di bidang perdagangan, yang membidangi pasar 1 orang belum bisa mengatasi hal ini. Satu orang staf ini pun masih merangkap pekerjaan lain”

Dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi menyatakan bahwa untuk mengontrol bagaimana pengelolaan pasar perlu tenaga yang lebih selama ini tenaga pelaksana pasar terbatas hanya 1 orang itupun merangkap pekerjaan lain.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan¹⁴⁾ bahwa:

¹³Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

“ Staf kami masih terbatas, belum ada tupoksi yang mengikat khusus menangani pasar. Selama ini pekerjaan mereka merangkap memegang secara lisan ada 1 staf yang kami tunjuk tetapi tupoksinya masih mengikuti tupoksi global bidang perdagangan ”

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa kurangnya tenaga dari Dinas tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi untuk menangani masalah pasar khususnya masalah pengelolaan pasar. Untuk itu perlu adanya tenaga yang lebih fokus di bidang pasar, apabila memungkinkan perlu di bentuk lagi Dinas Pasar agar pengelolaan pasar bisa berjalan dengan baik, melalui Dinas Pasar inilah petugas dapat mengontrol dengan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pasar. Karena selama ini banyaknya pekerjaan dan keterbatasan tenaga itulah yang menyebabkan petugas pelaksana pasar kewalahan sehingga jarang turun kelapangan. Berkaitan dengan sumber daya van horn dan van meter menyatakan bahwa sumber daya ini sangat mempengaruhi keberhasilan proses kebijakan, jika kondisi dilapangan adalah seperti yang diungkapkan oleh Dinas Perindagkop maka dapat di katakan proses implementasi kebijakan sangat sulit untuk dicapai.

Seperti dikutip dari Hasil Wawancara dengan ketua pasar¹⁵⁾ bahwa :

“Perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi sangatlah kurang bisa kita lihat jarang mereka turun ke pasar meninjau atau memberikan arahan kepada pedagang dan ketua pasar, selama ini saya menjabat sebagai kepala pasar seingat saya hanya 2 kali dalam setahun meninjau ke pasar. Menurut saya itu kurang maksimal, karena banyaknya permasalahan di pasar yang perlu diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi”

Dari hasil wawancara diatas kurangnya monitoring dan sosialisasi terhadap pedagang dan ketua pasar karena intensitas peninjauan kelapangan hanya 2 kali dalam setahun sedangkan permasalahan di pasar kemungkinan tiap hari ada,

¹⁴Hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

¹⁵Hasil wawancara dengan Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

bukan hanya masalah pelaku pasar, juga masalah kebersihan pasar, dan terutama masalah pengelolaan pasar.

Seperti dikutip dari Hasil Wawancara Pedagang sayur ¹⁶⁾ bahwa :

“Perhatian pelaksana pasar sangat luar biasa yang diberikan tetapi tidak ada realisasinya contoh waktu itu katanya akan melakukan pembersihan sarang laba-laba diplavon dan akan dicat ulang plavon pasar pada kenyataannya sampai sekarang tidak dilakukan”

Dari hasil wawancara ini dapat megambarkan bahwa sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses kebijakan van horn dan van meter menegaskan dalam teorinya bahawa sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, maka melihat kondisi yang terjadi pemerintah perlu memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia di Pemerintah daerah khususnya di Dinas perindustrian dan Perdagangan, agar mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan.

Sumberdaya lainnya yakni ketersediaan sarana prasarana. Seperti dikutip dari Hasil Wawancara dengan staf pelaksana pasar¹⁷⁾ bahwa :

“Sarana dan prasarana dipasar belum memadai karena tidak adanya anggaran dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasipernah memberikan bantuan alkon untuk kebersihan pasar, itupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar selama ini sarana dan prasarana dipenuhi oleh kesadaran dari pedagang itu sendiri contoh air yang ada di WC membelinya dengan uang kumpulan dari setiap pedagang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pelaksana pasar bahwa sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung sistem pengelolaan pasar sedangkan yang terjadi dilapangan sarana dan prasarana kurang memadai tetapi pihak dinas berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana secara bertahap.

¹⁶⁾Hasil wawancara dengan pedagang sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

¹⁷⁾Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

Begitu juga yang dikemukakan oleh Pedagang Ikan¹⁸⁾ bahwa:

“ Untuk kamar mandi atau WC tidak berfungsi sama sekali, ketua RT. Setempat mencoba membantu pedagang untuk membelikan profil tank (tangki air) kemudian airnya diisi tetapi sekali diisi berikutnya sudah tidak terisi lagi tidak ada pengelolaan keuangan tentang fasilitas sarana dan prasarana dipasar”

Sependapat dengan hasil wawancara pembeli¹⁹⁾ :

“ Di pasar pada saat hujan pasar bau dan kotor Karena banyaknya sampah yang tertumpuk diparit-parit dan selokan-selokan sehingga air peceran naik keatas, kurangnya air untuk membersihkan pasar dan tidak adanya air di WC menyebabkan WC bau sekali”

Dari hasil wawancara ini perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi kepentingan pengelolaan pasar, karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, apabila pasar kotor dan bau penjual tidak merasa nyaman dan pembeli akan sepi karena tidak sanggup untuk mencium aroma pasar yang bau dapat membuat mual dan pusing.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ternyata memang benar terjadi penumpukan sampah di depan pasar sampai sampah bau dan berulat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran, kedisiplinan pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitarnya. Lambatnya tindakan dari pengelola pasar mengenai hal ini begitu juga dengan pihak Dinas.

Sebenarnya pengelolaan sampah ini tugas dari Dinas Perhubungan dan pada saat dilakukan penelitian ini pihak DKPP atau penyapu jalanan dan pengangkut sampah belum dipekerjakan oleh Dinas terkait karena belum ada anggaran, terjadilah hal yang tidak diinginkan pedagang menumpuk sampah di depan pasar berharap pengangkut sampah mengambil sampah ternyata tidak

¹⁸Hasil wawancara dengan Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

¹⁹Hasil wawancara dengan Pembeli Kabupaten Tana Tidung, 14 April 2016

ada. Akibatnya sampah berceceran didepan pasaryang membuat pembeli enggan untuk masuk dan berbelanja di dalam pasar, sehingga pasar menjadi sepi.

Menurut pendapat Van Horn Varn meter Faktor Sumber Daya merupakan hal yang paling krusial karena berkaitan dengan tenaga dan keuangan. Sumber daya finansial merupakan sumber yang penting karena jika sumber daya manusia sudah kompeten namun tidak tersedia dana melalui anggaran maka akan sulit untuk merealisasi apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Seperti dikutip dari hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan²⁰⁾ bahwa:

“ Untuk membentuk tim retribusi kita memerlukan anggaran yang tidak sedikit perlu ada dukungan pemerintah untuk mewujudkan hal ini ”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa perlunya anggaran untuk membentuk tim retribusi pasar yang sedikit anggarannya, menurut beliau perlu adanya dukungan dari pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh staf pelaksana pasar²¹⁾ bahwa:

“ Mengapa retribusi pasar belum berjalan sampai saat ini karena terbentur anggaran, anggaran lebih di fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, didalam tim retribusi pasar banyak instansi yang terlibat terutama dispenda sampai saat ini pun pengurus pasar tidak ada honor nya karena tidak ada anggaran ”

Begitu juga yang dikemukakan oleh staf pelaksana pasar ada beberapa instransi yang terlibat dalam pengelolaan distribusi pasar yaitu dispenda, linmas dan satpol pp, pengelola pasar. Sampai saat ini pun pengelola pasar belum mendapatkan honor karena retribusi pasar belum berjalan karena memerlukan

²⁰Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

²¹Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

anggaran. Pemerintah saat ini hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara pedagang Ikan ²²⁾ bahwa :

“ Di Pasar Imbayud Taka Retribusi pasar belum berjalan . Saya pernah berjualan di pasar di daerah jawa , sistem retribusinya berjalan sangat baik pedagang yang mempunyai kios dan los dianjurkan membayar retribusi kios dan los serta kebersihan pasar. Ada dua karcis yang diberikan kepada pedagang yaitu karcis retribusi kios dan los, serta karcis kebersihan pasar dengan penarikan biaya sesuai dengan ukuran los dan kiosnya”

Berbeda lagi halnya dengan pendapat pedagang ikan berdasarkan pengalamannya berjualan di daerah jawa sistem retribusi dipungut dengan menggunakan karcis. Ada dua karcis yaitu untuk penyewaan los dan kios serta kebersihan pasar sementara di pasar Imbayud Taka belum berjalan, sehingga berimplikasi pada ketertiban dalam pengelolaan retribusi pasar.

Dari Hasil wawancara ini jika dikaitkan dengan teori Van horn Van meter dari segi faktor sumber daya financial perlu adanya tindakan dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan retribusi pasar ini, pemerintah daerah seharusnya memberikan dukungan program dan kegiatan serta anggaran ke Dinas Tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi mengenai pengelolaan pasar, memang infrastruktur dasar itu sangat diperlukan tetapi untuk jangka panjang, sedangkan permasalahan retribusi pasar ini sudah lama tidak ada tindakan. Apabila retribusi pasar berjalan maka sistem pengelolaan keuangan pasar juga bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal ini kebijakan pengelolaan pasar belum tentu semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang

²²⁾Hasil wawancara dengan Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

diinginkan, tentunya ada hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang ditemukan.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Staf Pelaksana Pasar²³) bahwa :

“ Untuk mengimplementasikan kebijakan Kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kami menemukan beberapa hambatan dan kendala yaitu anggaran. Selama ini belum ada anggaran khusus untuk mengelola pasar. Anggaran yang digunakan masih mengikuti anggaran kegiatan lain dibidang perdagangan yaitu anggaran monitoring Sidak sembako, sedangkan dipasar perlu banyak pembenahan baik dari Sarana dan Prasarana maupun sistem pengelolaan pasarnya”

Menurut pendapat staf pelaksana pasar menyatakan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan sudah sesuai dengan aturan hanya saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama ini belum adanya anggaran khusus mengenai pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung.

Dari Hasil wawancara di atas memberikan kecenderungan bahwa dari segi faktor sumber daya financial yang dikemukakan oleh pakar implementasi kebijakan Van Horn dan Varn Meter menganggap bahwa begitu pentingnya anggaran, walaupun program dan kegiatan sudah direncanakan tetapi tidak disetujui oleh tim TAPD atau disebut dengan Tim Anggaran pemerintah daerah maka program dan kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan karena tidak ada anggaran. Untuk itu Program dan Kegiatan perlu dipertahankan pada saat asistensi dengan Tim TAPD dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan transmigrasi. Sebaiknya dari Pihak Dinas dapat memberikan pandangan bahwa Pasar Imbayud Taka ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah karena pasar Imbayud Taka ini adalah salah satu motor penggerak perputaran ekonomi di Kabupaten Tana Tidung.

²³Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai anggaran untuk program dan kegiatan pengelolaan pasar ini tidak dianggarkan secara spesifik, anggaran monitoring, dan yang berkaitan dengan pasar masih ditopang oleh anggaran dari program dan kegiatan lain. Dengan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang biasa disingkat SPPD dengan rincian anggaran 1 hari Uang harian dibayar senilai 500rb, karena pasar Imbayud Taka berada didalam daerah maka yang dibayar hanya UH saja yang sudah termasuk biaya transport dan uang makan perhari. Untuk membantu penambahan fasilitas pasarpun seperti Alkon masih menggunakan dana kumpulan dari SPPD dari masing-masing PNS.

Berdasarkan Uraian tentang Sumber Daya ini menunjukkan bahwa anggaran sangatlah penting dalam menjalankan semua program dan kegiatan untuk pengelolaan pasar, walaupun staf mempunyai keahlian dan staf pelaksana banyak belum tentu program dan kegiatan bisa berjalan karena keterbatasan anggaran atau bahkan tidak ada sama sekali anggaran. Waktu juga sangatlah penting apabila anggaran tidak disetujui tahun ini kemudian baru disetujui tahun depan juga bisa berdampak terhambatnya rencana yang sudah disiapkan pasar sempat menjadi bertambah kumuh.

3. Karakteristik Agen pelaksana

Karakteristik Agen pelaksana merupakan teori terakhir dari Model teori implementasi kebijakan Van Horn Varn Meter. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri

yang tepat serta cocok misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku atau tindakan manusia radikal, maka agen pelaksana proyek haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Organisasi formal yang dimaksud disini adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan transmigrasi dan organisasi informal yang dimaksud adalah pedagang pasar tradisional.

Dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi mengerti dan jelas apa saja yang menjadi tugas mereka dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan peraturan menteri perdagangan selain itu juga ada pembagian tugas terhadap apa yang menjadi tugas mereka.

Seperti dikutip dari hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan ²⁴) bahwa:

“ Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ada 3 bidang yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm khusus bidang perdagangan memiliki 4 staf yang membidangi pasar 1 orang setiap bidang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing, karena keterbatasan tenaga setiap orang merangkap beberapa pekerjaan ”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan mengemukakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi khusus pada bidang perindagkop terdapat tiga bidang yaitu, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk bidang perdagangan memiliki 4 staf dimana staf pelaksana pasar hanya 1 orang saja yang juga merangkap pekerjaan yang lain.

Sikap dan kecenderungan pelaksana lain yaitu ketua pasar ²⁵) bahwa:

²⁴Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

“ Saya sebagai ketua pasar ditunjuk oleh pedagang pasar dari 2 tahun yang lalu tidak ada honor yang diberikan kepada saya jadi selama ini saya kerja sosial tidak ada perhatian dari Dinas Tenaga, Kerja dan Perindagkop bagaimana nasib kami sebagai pengurus-pengurus pasar”

Dari pernyataan ketua pasar di atas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku ketua pasar cenderung spontanitas dalam menyampaikan keluhan-keluhannya yang sebenarnya memang menjadi haknya pengelola pasar untuk mendapatkan hasil dari kerjanya yang selama ini belum diperhatikan oleh Dinas terkait.

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan²⁶⁾ bahwa:

“ Kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang menyalahi aturan kami ada tim sidak untuk turun meninjau kelapangan, selama ini kami juga memberikan teguran kepada pedagang yang melebihi batas yang seharusnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi akan melakukan tindakan tegas melalui tinjauan dan laporan dari tim Sidak apabila terdapat indikasi penyalahgunaan aturan yang telah ditetapkan.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar²⁷⁾ bahwa :

“ kalau ada tindakan dari pedagang yang menyalahi aturan kami teguran mbak, kami berikan pandangan, arahan, teguran juga kepada pedagang yang menambah meja pasar sampai kedepan”

Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar menyatakan bahwa mereka berupaya memberikan pandangan, arahan serta

²⁵Hasil wawancara dengan Ketua Pasar dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

²⁶Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

²⁷Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

terguran kepada pedagang yang menyalahi aturan terutama mengenai penambahan meja pasar ke depan.

Sedangkan dikutip dari hasil wawancara dengan ketua Pasar²⁸⁾ bahwa :

“ Saya ditunjuk sebagai ketua pasar oleh pedagang di pasar dipercaya untuk mengelola pasar, saya selalu mengingatkan dan menegur apabila pedagang menyalahi aturan, untuk kebaikan bersama dan ada beberapa pedagang merasa pasar adalah milik mereka “

Dari hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan teori Van horn Van Meter dari segi karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dan ketua pasar tetapi pada kenyataan dilapangan masih ada pedagang yang tidak mengikuti aturan dengan menambah meja pasar tanpa seijin dari Dinas dan ketua pasar, mengapa pedagang melakukan hal tersebut.

Sedangkan dikutip dari hasil wawancara dengan Pedagang Sayur²⁹⁾ bahwa :

“ Kami mbak awalnya sudah tertib mengikuti arahan ketua pasar untuk tidak menambah meja pasar sampai kedepan tetapi pedagang lain tidak mengikuti arahan, jadi kami tidak mau juga mbak “

Dari hasil wawancara di atas dengan pedagang sayur menyatakan sikap pedagang satu dapat mempengaruhi sikap pedagang yang lain seperti dikemukakan pedagang sayur bahwa mereka sudah mengikuti arahan dari ketua pasar karena ada pedagang yang tidak mengindahkan arahan mereka juga jadi ikut-ikutan.

²⁸⁾Hasil wawancara dengan Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung, 15 April 201

²⁹⁾Hasil wawancara dengan Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

Sependapat juga yang dikemukakan oleh pedagang Ikan ³⁰⁾ bahwa :

“ Ya , justru kami menambah meja ada pungutan lagi mbak saya menambah meja ikan membayar lagi sebesar 2 juta ”

Berbeda lagi dengan pendapat pedagang ikan mereka justru membayar pungutan liar meja ikan sebesar 2 juta rupiah untuk satu meja ikan. Hal ini harus menjadi perhatian dari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi mengapa hal ini bisa terjadi.

Dari hasil wawancara jika dikaitkan dengan Model Van Horn Van Meter dilihat dari sumber daya manusia memberi makna bahwa kurang disiplinnya pedagang dan kurang adanya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi mengenai penambahan meja yang kemudian dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini harus di tindak tegas oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, Transmigrasi. Karena bisa jadi semua pedagang ikut-ikutan menambah meja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa ciri-ciri atau sifat pelaksana yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi kurang tegas, walaupun pihak dinas turun langsung dalam penertiban memberikan teguran dan pembinaan namun tidak terlalu memberikan efek jera kepada pedagang.

Begitu juga dengan kepala pasar tidak begitu tegas karena takut pedagang merasa tersinggung jadi hanya sebatas teguran saja tidak melakukan tindakan, salah satu upaya untuk mengimplementasi kebijakandengan cara menerapkan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuat.

Dalam peraturan di Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ini ada sanksi hukum diatur dalam Surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los pasar

³⁰⁾ Hasil wawancara dengan Pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016

yaitu sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertentu sebanyak-sebanyaknya, pencabutan Surat Keterangan penggunaan Kios atau Los, pengosongan tempat berdagang, didalam peraturannya larangan bagi pemegang surat keterangan disebutkan yaitu :

1. Setiap pemegang SKPKL dilarang mendirikan, mengubah, menambah, dan atau membongkar bangunan bangunan Kios atau Los pasar sebelum mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan transmigrasi;
2. Setiap pemegang Surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los Pasar dilarang memindahtangankan/menyewakan/mengontrakkan hak mempergunakan bangunan Kios dan Los Pasar kepada pihak lain dengan cara apapun kecuali seizing dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi;
3. Setiap pemegang Surat Keterangan dilarang mempergunakan Bangunan Kios dan Los Pasar untuk dijadikan tempat tinggal atau kediaman;
4. Setiap pemegang Surat Keterangan dilarang menggunakan bangunan Kios. Los dan halaman Pasar/ Pelataran Pasar untuk keperluan:
 - a. Menginap memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar dan atau meledak kecuali tempat yang khusus disediakan menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. Memperdagangkan hewan kecuali ditempat khusus yang disediakan
 - c. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan gangguan kesehatan sekitar Pasar;

5. Setiap pemegang Surat keterangan yang menggunakan Bangunan Kios dan Los Pasar, untuk usahanya berkewajiban untuk mengatur dagangannya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kesehatan umum;
6. Berjudi atau perbuatan amoral dalam lingkungan pasar;
7. Menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan lingkungan pasar;
8. Masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk dan atau;
9. Masuk kedalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;

Adapun Sanksi yang akan diberikan apabila pemegang Surat Keterangan penggunaan Kios atau Los tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dikenakan sanksi yaitu pencabutan atau pembatalan Surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana atau Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa larangan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja sanksi hukum tidak terlalu berat karena tidak ada sanksi untuk pemegang SKPKL yang memperjual belikan Los atau Kios Pasar. Seharusnya perlu sanksi tegas dan keras bagi pemegang SKPKL yang menyewakan dan memperjualbelikan kios sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pedagang dan ketua pasar yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Uraian tentang Karakteristik Agen Pelaksana dari Model Van Horn Van Meter bahwa Kecendrungan pelaksana adalah menerima dengan baik kebijakan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi

berupaya melakukan usaha seperti komunikasi interaktif kepada para pedagang tentang kebijakan tersebut yang tidak lain agar semua pihak dapat bekerjasama dengan baik sehingga tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai. Sebagai agen pelaksana mereka sudah bersikap keras dan tegas menindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi ketua pasar perlu adanya pembinaan mengenai sikap dan perilakunya. Demikian pula bagi pedagang yang kurang mematuhi aturan yang berlaku seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan mudah ikut-ikutan pada tindakan yang salah seperti menambah meja tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Dinas, hal ini perlu menjadi perhatian dari Dinas Tenaga kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi untuk sering melakukan peninjauan dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan terhadap ketua pasar dan pedagang, sehingga Ketua pasar dan pedagang tidak merasa tidak diperhatikan karena selama ini hal itulah yang menjadi keluhan mereka yaitu kurangnya perhatian.

4. Penguatan Aktivitas dan Komunikasi antar Organisasi

Dari teori Model Van Horn Van Meter mengemukakan beberapa Faktor salah satu faktor adalah faktor Penguatan Aktivitas dan Komunikasi antar Organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, begitu sebaliknya.

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi³¹⁾ bahwa

“ Sampai saat ini belum ada koordinasi dari ketua pasar hal ini bisa kita pahami karena ketua pasar dari segi pendidikan masih rendah, sehingga tidak tahu apa yang ia lakukan ”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi menyatakan bahwa kurang ada koordinasi dari ketua pasar mengenai sistem pengelolaan pasar Imbayud Taka, baik berupa laporan-laporan maupun keluhan-keluhan dari pedagang juga belum pernah disampaikan.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar³²⁾ bahwa:

“ Kurangnya Koordinasi antara saya dan ketua pasar sehingga apa yang terjadi dipasar belum pernah dilaporkan kepada saya jadi beliaulah yang mengelola pasar selama ini bukan saya “

Berbeda halnya dengan pendapat Staf Pelaksana Pasar ada koordinasi dengan ketua pasar tetapi intensitas koordinasinya kurang hal ini menyebabkan belum adanya laporan-laporan dan keluhan dari pedagang yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi.

Dikutip dari Hasil wawancara dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan³³⁾ bahwa:

“ SKPD dan pihak yang terlibat di dalam kebijakan pengelolaan pasar yaitu Dinas Tenaga Kerja, perindagkop dan Transmigrasi sebagai leadernya, Dispenda, Linmas & Satpol PP, Kecamatan yang mempunyai wilayah, Dinas PU dan perhubungan urusan pengelolaan sampah, Kapolsek dan danramil untuk keamanan pasar, serta Kepala Desa dan RT setempat “

³¹Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

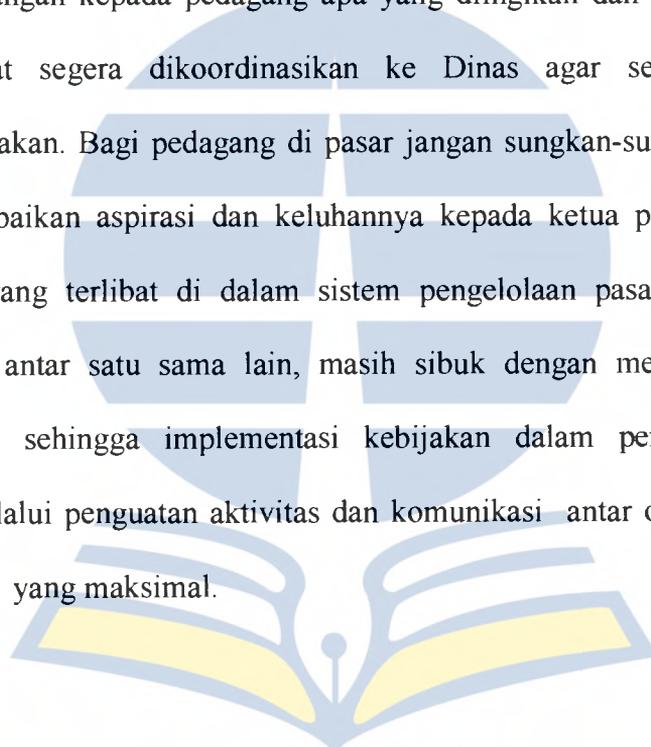
³²Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

³³Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Perindagkop dan Transmigrasi di atas menyatakan bahwa ada beberapa SKPD yang terlibat dalam Kebijakan pengelolaan pasar yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi sebagai leadernya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan daerah atau lebih dikenal dengan Dispenda yang mengelola keuangan retribusi pasar, Dinas PU dan Perhubungan mengenai pengelolaan sampah, kapolsek dan danramil untuk keamanan wilayah pasar serta dengan Pihak Kecamatan, Kepala desa dan RT setempat yang mempunyai wilayah di mana pasar berdiri.

Dari hasil wawancara jika dikaitkan dengan teori Van Horn Van Meter dari sisi penguatan aktivitas dan komunikasi organisasi menunjukkan bahwa kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dan staf pelaksana pasar ketua pasar merupakan perpanjangan tangan mereka kepada pedagang yang ada dipasar. Biasanya ketua pasar secara batin lebih dekat dengan pedagang pasar jadi ketua pasar lebih tau apa yang diinginkan oleh pedagang pasar. Seharusnya aspirasi dari pedagang kemudian disampaikan atau dikomunikasikan dengan pihak Dinas, sehingga apa yang diperlukan oleh pedagang baik dari pengelola pasar sampai dengan bantuan pemasaran bisa diupayakan dan dianggarkan oleh Dinas. Ketua pasar juga dapat mengatasi masalah internal konflik pedagang. Selain itu juga ada SKPD dan pihak yang seharusnya terlibat didalam pengelolaan pasar hanya saja sampai saat ini belum adanya sinergitas antar pihak-pihak terkait itu yang menjadi persoalan untuk itu perlu adanya koordinasi, sehingga semua yang berkepentingan dan merasa memiliki pasar, sehingga diharapkan pasar yang bersih dan nyaman bukan tempat pemukiman kumuh.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori Van Horn Van Meter tentang Faktor Penguatan Aktivitas dan Komunikasi menunjukkan bahwa hubungan kerja antar organisasi yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dan pihak-pihak terkait dapat dikatakan belum sesuai dengan harapan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang menyebabkan pasar kurang diperhatikan. Adanya dukungan dan komunikasi yang baik antar SKPD dapat membantu Dinas dalam mengajukan program dan kegiatan mengenai pengelolaan pasar. Untuk para pedagang dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi. Bagi ketua pasar dapat menjadi perpanjangan tangan kepada pedagang apa yang diinginkan dan dikeluhkan oleh pedagang dapat segera dikoordinasikan ke Dinas agar secepatnya dinas melakukan tindakan. Bagi pedagang di pasar jangan sungkan-sungkan dan takut untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada ketua pasar, selama ini semua pihak yang terlibat di dalam sistem pengelolaan pasar masih kurang berkomunikasi antar satu sama lain, masih sibuk dengan menjalankan tugas masing-masing, sehingga implementasi kebijakan dalam pengelolaan pasar Tradisional melalui penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi belum mencapai hasil yang maksimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung belum mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan Keuangan yang belum jelas dan masih menggunakan pembukuan sederhana, pengelolaan retribusi pasar peraturan Bupati sudah ada tetapi SK pembentukan Tim belum berjalan. Pengelolaan Sampah yang masih belum jelas tupoksinya siapa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah. Pengelolaan Sumber daya SK pembentukan ketua pasar ada tetapi tidak berjalan dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Secara umum Implementasi Kebijakan Pengelolaan pasar Tradisional Imbayud Taka telah diterapkan namun masih menemui kendala dilapangan. Kendala tersebut tercakup dalam empat factor yaitu, Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana dan Penguatan Aktivas dan Komunikasi antar organisasi yang umumnya belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Faktor Standar dan Sasaran kebijakan ,bahwa pasar yang ada belum memenuhi standar pasar untuk sebuah Kabupaten. Sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai, pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi sudah berupaya mengimplementasikan kebijakan hanya saja perlu kerjasama dari pedagang dan pengelola pasar karena selama ini pedagang dan ketua pasar masih membuat aturan sendiri.

Berdasarkan Faktor Sumber daya manusia dapat dilihat bahwa ada dua yang sangat penting yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Adapun sumberdaya manusia masih sangat terbatas, tenaga pelaksana menjalankan tugas sesuai tupoksinya, tetapi belum ada tupoksi khusus menangani pasar masih merangkap pekerjaan yang lain. Karena keterbatasan tenaga inilah yang menyebabkan perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi kurang, Begitu juga dengan sumber daya anggaran belum ada anggaran khusus menangani masalah pengelolaan pasar, selama ini anggaran untuk kegiatan pasar masih ditopang dari anggaran program dan kegiatan lain melalui SPPD untuk turun meninjau kelapangan. Besaranjumlah SPPD yang diterima cukup besar karena wilayah pasar terletak didalam daerah di Kabupaten Tana Tidung. Perhari Uang harian yang termasuk didalamnya biaya transportasi dan uang makan sebesar Rp.500 ribu rupiah, terkadang untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pasar masih menggunakan dana kumpulan dari SPPD program dan kegiatan lain seperti membeli alkon dan air bersih.

Karakteristik Agen Pelaksana, menunjukkan masih kurangnya perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi khususnya pelaksana pasar. Kurangnya Kesadaran pedagang karena masih ada pedagang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tidak adanya transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan pasar yang dipungut oleh ketua pasar selama ini.

Faktor Penguatan Aktivitas dan komunikasi antar organisasi ,belum berjalan dengan baik . Selama ini hubungan antara Dinas Tenagakerja, perindagkop, dan Transmigrasi, pelaksana pasar, pengelola pasar, pedagang dan pembeli kendati berjalan dalam bentuk sosialisasi dan peninjauan kelapangan

,namun masih belum maksimal . Hal ini dapat dilihat dari berimplikasi pada belum terealisasinya pengelolaan retribusi pasar yang terkait Dinas pendapatan Daerah (DISPENDA) serta pengelolaan sampah yang belum maksimal.

B. SARAN

Saran mengenai factor standar dan sasaran kebijakan yaitu perlunya penyusunan regulasi yang sesuai dengan konsep kebijakan yang ideal mulai dari formulasi, implmentasi sampai kepada evaluasi kebijakan tersebut. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung membentuk SKPD yang langsung berkaitan dengan pasar, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Agar Sasaran kebijakan tepat sasaran.

Faktor Sumber daya Manusia perlu adanya penambahan tenaga Pegawai negeri sipil yang ahli di bidang analisis kebijakan khususnya yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional, mempersiapkan tenaga ahli yang dapat di terjunkan langsung di lapangan dan melakukan pengawasanterhadapkebijakan-kebijakan yang telah di ditetapkan. Untuk menangani permasalahan pengelolaan pasar, kedepan dapat lebih ditingkatkan dengan membentuk Dinas Pasar sehingga pengelolaan pasar lebih focus dilakukan oleh Dinas Pasar. Dari Sumber Daya anggaran perlu adanya dukungan pemerintah daerah terkait dengan anggaran pengelolaan pasar. untuk SKPD yang terlibat dalam pengelolaan pasar juga dapat memberikan masukan-masukan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan mengenai pengelolaan pasar. Mengenai Faktor Karakteristik Agen Pelaksana perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana pasar dengan cara

mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding kepasar yang sudah bagus dan layak sistem pengelolaan pasarnya.

Pelaksana pasar harus lebih tegas menindak apabila ada pedagang dan pengelola pasar yang melanggar aturan-aturan mengenai pasar yang sudah diberlakukan oleh Dinas Tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi. Bagi ketua pasar harus lebih tegas dalam menjalankan kebijakan dan menertibkan pedagang yang ada di pasar. Tugas dan tanggungjawabnya bukan hanya memungut biaya dari pedagang pasar.

Untuk pedagang pasar tradisional perlu adanya kesadaran yang tinggi dalam memelihara lingkungan kebersihan pasar terutama lokasi letak kios atau losnya tempat pedagang berjualan, membuang sampah pada tempatnya sehingga dapat menciptakan pasar bersih dan nyaman. Saran peneliti dari Faktor Penguatan Aktivitas dan komunikasi, komunikasi antar Dinas Tenagakerja, perindagkop dan transmigrasi dengan pengelola pasar, dan pedagang perlu ditingkatkan melalui peninjauan kelapangan yang dilakukan bisa dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang dan pengelola pasar secara berkala baik perbulan, pertriwulan maupun persemester. Komunikasi antar SKPD juga perlu ditingkatkan terkait dengan pengelolaan pasar sehingga sinergitas antar SKPD dapat terwujud.

Perlu adanya kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung baik dari SK Kegiatan yang mengatur tentang pengelolaan pasar maupun berupa peraturan bupati. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan pasar hal ini perlu

ditindaklanjuti. Sebaiknya dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi perlu melakukan studi banding kedaerah yang sudah maju pengelolaan pasar .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. (2013). *Manajemen Pemasaran*. PT. Rajawali Pers Jakarta
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subroto Bambang, Tyw (2005). *Coorporate Goverment Or Good Coorruption Gavernance*. Jakarta : Gramedia
- Budi Winarno, MA (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo
- Caroline Paskarina. (2007). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*
- Darmawan, Edy. (2005). *Analisa Ruang Publik Arsitektur Kota Semarang*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Dewi Winarni. (2013). Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, ASBN
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis, Terjemahan*. Englewood Cliffs : New Jersey.
- Dunn, William N. (2000). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2007). *Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta
- Darmawan, Edy. (2005). *Analisa Ruang Publik Arsitektur Kota*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Firmanzah dan R.E.Halim.(2012). *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional In: Basri, M.C, Editor Rumah Ekonomi Budaya* , Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, Z M (1990). *Karakteristik Penelitian Kualitatif*, Malang : YAB
- Isnaini Rodiyah, dan Ilmi Usrotin Choiriyah. (2016) *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Modern di Kabupaten*

Sidoarjo, *Jurnal Dinamika Manajemen*. Diakses tgl 28 Agustus 2016, dari situs World Wide Web:
<http://www.ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/190>.

Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kartini, Rini. (2002). Dampak Perpindahan Lokasi Pasar Induk terhadap Sistem Pemasaran Sayur Mayur di Kota Bogor. Bogor: *Skripsi*. Program Sarjana. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor..

Keban, Y.T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : PT. Gava Media.

Kira, Yamato. (2011). *Kekurangan dan Kelemahan Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, www.fhryamato.blogspot.com, posting: Selasa, 15 Maret 2011, 06:54 WIB

Lexy J., Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Murdiningsih. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 160. 29 Agustus 2016, dari situs World Wide Web:
<http://www.ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewfile/508/4599>

Musthakim. (2004). *Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jepara*

Dewi Mustika Nirmala. (2015). Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo. , *Jurnal Politik Muda*, Vol.4, No.1, 126-136.

Nugroho, Riant. (2011). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pratiwi Ratna. (2012), *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Penduduk Di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Riau*.

- Sadillah, Emiliana dkk. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Martono Satoto . (2006) *Analisis Potensi dan Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar di Kota Surakarta*
- Singarimbun. (1995), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S
- Subarsono. (2008). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subowo dan Eko. (2002). *Pokok Pikiran Deregulasi Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Sebagai Lembaga Pertumbuhan Ekonomi*. Diklat dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri
- Suharno. (2009). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta : UNY.Press
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:ALFABET
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:ALFABET
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung:ALFABET
- Sulaeman, Affan. (1998). *Public Policy Kebijakan Pemerintah*, Kerjasama UNPAD-IIP-Bandung
- Sulistiyowati Dwi Yulita, (1999). *Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan Berdasarkan Pengamatan Prilaku Belanja*. Bandung
- Suandi. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta
- Tandiyar, Alan. 2002. *Kajian Perkembangan Pasar Tanah Baru Sebagai Acuan Bagi Pembangunan Pasar Tradisional Baru di Kota Bogor*. Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Thamrin. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Purbalingga. Diambil 29 Agustus 2016, dari situs World Wide Web:
<http://www.ejurnal.com/2013/12/implementasi-kebijakan-zonasi-pasar.html>

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wibawa. (2011). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo (Anggota IKAPI)

Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Bayu Media

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarni. (2013). *Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, ISBN

Zumrotin KS. (2002). *Pola Keterkaitan Pasar Modern dengan Swalayan*, Diklat Manajemen Pasar Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 *tentang Pasar Tradisional*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M DAG/PER/12/2013, *tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 *tentang Pedoman sarana dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan*

Dokumen-dokumen lain :

Kemendag. (2015). *Pedoman Pemanfaatan Pasar Rakyat*

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
IMBAYUD TAKA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG

A. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00

1. Menurut Bapak apakah pasar Imbayud taka telah memenuhi standar berdasarkan Permendag Nomor MDAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Sarana dan Pengelolaan Sarana distribusi perdagangan
 Jawab : Pasar Imbayud Taka belum memenuhi standar pasar Karena pasar ini dibangun tahun 2007, pasar ini dibangun pada saat Tana Tidung masih dalam status kecamatan oleh karena itu standarnya ya standar kecamatan bukan standar kabupaten kami berharap kedepan Bupati kita lebih memperhatikan masalah pasar dan pembangunannya, karena pasar merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tana tidung

2. Apakah Implementasi Kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderntentang pasar tradisional telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung
 Jawab : Kita Berupaya untuk menjalankan Kebijakan Permendag No.70/M- DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan menyesuaikan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, seperti tahun ini bahwa pemerintah pusat dalam nawacitanya akan merevitalisasi dan membangun 5000 pasar tradisional kedepan kita akan coba mengajukan dana DAK atau TP untuk pembangunan pasar baru dan merevitalisasi pasar yang sekarang, pembangunan ini tdak terlepas dari keinginan kebijakan permendag tersebut

3. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
 Jawab : Harapan kita semua, orang yang berada dipasar baik, pengelola pasar, pedagang, pembeli, semua merasa enak, aman, tertib, nyaman dan senang dengan berada di pasar tidak ada kesan begitu pulang kerumah pasar bau dan kotor membuat kita mual dan pusing. Kondisi pasar Imbayud Taka masih jauh dari harapan masih ada keluhan-keluhan seperti bau dan kotor, Oleh karena itu kita akan mencoba pasar dikelola oleh UPTD atau kedepannya kita akan bentuk Dinas Pasar dengan adanya

Dinas Pasar ini bisa lebih fokus dalam mengelola dan menangani masalah pasar

4. Menurut bapak bagaimana kemampuan kepala pasar atas pengelolaan pasar dalam menertibkan pedagang
Jawab : Sampai saat ini belum ada koordinasi dari ketua pasar hal ini bisa kita pahami karena ketua pasar dari segi pendidikan masih rendah, sehingga tidak tahu apa yang ia lakukan
5. Menurut bapak bagaimana kemampuan staf pelaksana terhadap pembinaan kepada pedagang
Apabila kita melihat saat ini dinas kami kekurangan tenaga sehingga sampai saat ini kami tidak bisa mengontrol bagaimana pengelolaan pasar itu sebenarnya, walaupun banyak informasi negative tentang penempatan pedagang pasar. Dengan jumlah 4 orang staf yang ada di bidang perdagangan, yang membidangi pasar 1 orang belum bisa mengatasi hal ini. Satu orang staf ini pun masih merangkap pekerjaan lain

B. Kepala Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00

1. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja , Perindagkop, dan Transmigrasi selama ini mengenai sistem pengelolaan pasar berlangsung
Jawab : Selama ini kami berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan permendag No.70 /M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar, dalam hal ini penataan produk dagang agar lebih rapi dan terlihat indah, pada awalnya semua menanggapi sosialisasi ini satu bulan kemudian sudah terjadi perubahan kembali semrawut malah ada penambahan meja pasar yang dibuat oleh pengelola pasar
2. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
Jawab : Saya berharap supaya pedagang lebih menjaga lingkungan sekitarnya agar lebih terlihat bersih dan produk yang dijual bersih dari debu dan tertata rapi, begitu juga dengan ketua pasar saya berharap dapat mengelola pasar dan lingkungan pasar dengan baik sehingga tercapai tujuan kita pasar bersih dan nyaman

3. Menurut saudara apakah sistem pungutan retribusi pasar sudah berjalan saat ini
Jawab : Begini mbak, untuk membentuk tim retribusi kita memerlukan anggaran yang tidak sedikit perlu ada dukungan pemerintah untuk mewujudkan hal ini
4. SKPD dan lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar
Jawab : SKPD dan pihak yang terlibat di dalam kebijakan pengelolaan pasar yaitu Dinas Tenaga Kerja, perindagkop dan Transmigrasi sebagai leadernya, Dispenda, Linmas & Satpol PP, Kecamatan yang mempunyai wilayah, Dinas PU dan perhubungan urusan pengelolaan sampah, Kapolsek dan danramil untuk keamanan pasar, serta Kepala Desa dan RT setempat
5. Menurut bapak bagaimana kemampuan staf pelaksana terhadap pembinaan kepada pedagang
Staf kami terbatas mbak belum ada tupoksi yang mengikat khusus menangani pasar selama ini pekerjaan mereka merangkap memang secara lisan ada 1 staf yang kami tunjuk tetapi tupoksinya masih mengikuti tupoksi global bidang perdagangan mbak.
6. Bagaimana pembagian tugas bagi staf pelaksana pasar
Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ada 3 bidang yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm khusus bidang perdagangan memiliki 4 staf yang membidangi pasar 1 orang setiap bidang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing, karena keterbatasan tenaga setiap orang merangkap beberapa pekerjaan
7. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan
Kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang menyalahi aturan kami ada tim sidak untuk turun meninjau kelapangan, selama ini kami juga memberikan teguran kepada pedagang yang melebihi batas yang seharusnya

C. Staf Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
Jawab : Harapan saya kepada Pemerintah Daerah menyetujui anggaran Program dan kegiatan mengenai pasar agar pasar dapat dikelola dengan baik, dengan adanya anggaran kita bisa bertindak cepat

2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung
Jawab : Sarana dan prasarana di pasar belum memadai karena tidak adanya anggaran dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi pernah memberikan bantuan alkon untuk kebersihan pasar, itupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar selama ini sarana dan prasarana dipenuhi oleh kesadaran dari pedagang itu sendiri contoh air yang ada di WC membelinya dengan uang kumpulan dari setiap pedagang.
3. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah berjalan saat ini
Jawab : Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kami menemukan beberapa hambatan dan kendala yaitu anggaran. Selama ini belum ada anggaran khusus untuk mengelola pasar. Anggaran yang digunakan masih mengikuti anggaran kegiatan lain di bidang perdagangan yaitu anggaran monitoring, Sidak sembako, sedangkan di pasar perlu banyak pembenahan baik dari sarana dan prasarana maupun sistem pengelolaan pasarnya, jika dibandingkan dengan tenaga pengelola dibidangnya sangatlah mencukupi dan memadai, saya yakin jika kucuran dana yang tersedia memang melebihi, pasar tersebut cepat pembangunan dan perkembangannya karena di kelola baik oleh sumber daya manusia yang memang berkompeten didalamnya
4. Menurut saudara apakah pemilik kios awal masih sama dengan pemilik sekarang atau berubah
Jawab : Pada Awal terbentuknya pasar kami membuat sebuah surat pernyataan yaitu SKPKL dalam bentuk Formulir dan Surat yang lengkap, untuk pembagian los dan kios pasar kami lakukan pengundian agar adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antar pedagang. Saat ini penempatan Los & Kios sudah tidak sesuai dengan lot awal kami sedang berupaya untuk menindaklanjuti
5. Menurut saudara apakah sistem pungutan retribusi pasar sudah berjalan saat ini
Mengapa retribusi pasar belum berjalan sampai saat ini karena terbentur anggaran, anggaran lebih di fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, di dalam tim retribusi pasar banyak instansi yang terlibat terutama dispenda sampai saat ini pun pengurus pasar tidak ada honorinya karena tidak ada anggaran

6. Menurut Saudara bagaimana kemampuan kepala pasar atas pengelolaan pasar dalam menertibkan pedagang
Jawab : Kurangnya Koordinasi antara saya dan ketua pasar sehingga apa yang terjadi di pasar belum pernah dilaporkan kepada saya jadi beliaulah yang mengelola pasar selama ini bukan saya
7. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan
Jawab : kalo ada tindakan dari pedagang yang menyalahi aturan kami teguran mbak, kami berikan pandangan, arahan, teguran juga kepada pedagang yang menambah meja pasar sampai kedepan

D. Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 jam 12.00

1. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah berjalan saat ini
Jawab : berjalan tetapi masih menggunakan sistem pembukuan manual untuk pengelolaan keuangan jaga malan dan kebersihan.
2. Apakah ada tinjauan dan Monitoring dari Dinas terkait mengenai pengelolaan pasar
Jawab : Perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi sangatlah kurang bisa kita lihat jarang mereka turun ke pasar meninjau atau memberikan arahan kepada pedagang dan ketua pasar, selama ini saya menjabat sebagai kepala pasar seingat saya hanya 2 kali dalam setahun meninjau ke pasar. Menurut saya itu kurang maksimal, karena banyaknya permasalahan di pasar yang perlu diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi.
3. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan
Saya ditunjuk sebagai ketua pasar oleh pedagang di pasar dipercaya untuk mengelola pasar, saya selalu mengingatkan dan menegur apabila pedagang menyalahi aturan, untuk kebaikan bersama dan ada beberapa pedagang merasa pasar adalah milik mereka

E. Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 jam 14.00

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
Jawab : Harapan saya kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan kami pelaku pasar, terutama fasilitas kami di pasar dan masalah pengelolaan keuangan pasar yang belum jelas kemana arahnya

2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung
 Jawab : Untuk kamar mandi atau WC tidak berfungsi sama sekali, ketua RT. Setempat mencoba membantu pedagang untuk membelikan profil tank (tangki air) kemudian airnya diisi tetapi sekali diisi berikutnya sudah tidak terisi lagi tidak ada pengelolaan keuangan tentang fasilitas sarana dan prasarana di pasar
3. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah berjalan saat ini
 Jawab : kalo di Pasar Imbayud Taka Retribusi pasar belum berjalan mbak. Saya pernah berjualan di pasar di daerah jawa mbak, sistem retribusinya berjalan sangat baik pedagang yang mempunyai kios dan los dianjurkan membayar retribusi kios dan los serta kebersihan pasar. Ada dua karcis yang diberikan kepada pedagang yaitu karcis retribusi kios dan los, serta karcis kebersihan pasar dengan penarikan biaya sesuai dengan ukuran los dan kiosnya
4. Apakah ada tinjauan dan Monitoring dari Dinas terkait mengenai pengelolaan pasar
 Jawab: Perhatian pelaksana pasar sangat luar biasa yang diberikan tetapi tidak ada realisasinya contoh waktu itu katanya akan melakukan pembersihan sarang laba-laba diplavon dan akan di cat ulang plavon pasar pada kenyataannya sampai sekarang tidak dilakukan
5. Menurut saudara apakah benar adanya isu jual beli los kios di pasar.
 Jawab : Ada isu jual beli los dan kios itu benar mbak, saya mengalaminya sendiri 5 tahun yang lalu saya membeli los seharga 5 jt mbak, sekarang mungkin 7jt bahkan lebih mbak. Pemilik los awal itu bukan saya mbak karena saya butuh dan kebetulan losnya kosong jadi saya beli mbak dengan harga seperti itu

F. Pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 jam 16.00

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
 Jawab : Saya berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi bisa menertibkan pedagang Kaki Lima dan pedagang keliling untuk masuk berjualan di lokasi pasar karena los untuk pasar ikan baru terisi 4 meja dari 8 meja ikan, pasar sayur dan ikan menjadi sepi karena pembeli lebih memilih untuk membeli di PKL karena mudah terjangkau dan pedagang keliling yang praktis datang langsung kerumah-rumah

2. Menurut saudara apakah benar adanya isu jual beli los kios di pasar..
Jawab : Setau saya memang pedagang yang memiliki surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los sudah tidak sesuai, sekarang saja pemiliknya satu orang bisa memiliki 3 meja los dan ada yang disewakan serta diperjual belikan

G. Pembeli Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 16 April 2016 jam 12.00

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar
Jawab : Harapan saya kedepannya pemerintah dan pelaku pasar lebih memperhatikan masalah kebersihan, pasar yang bersih akan membuat kita untuk berlama-lama berbelanja dipasar, untuk pedagang sebaiknya barang yang dijual lebih beragam dan variatif agar pembeli puas belanja karena kebutuhan terpenuhi
2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung
Jawab : Di pasar pada saat hujan pasar bau dan kotor Karena banyaknya sampah yang tertumpuk diparit-parit dan selokan-selokan sehingga air peceran naik keatas, kurangnya air untuk membersihkan pasar dan tidak adanya air di WC menyebabkan WC bau sekali.

